

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**OPTIMALISASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
GUNA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL MASA PANDEMI COVID 19**

Oleh :

Dr. SRI SUNDARI, S.H., M.M., CGCAE.

No Peserta 082

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXIII
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2022**





KATA PENGANTAR

Assalaamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: **“Optimalisasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Guna Pemulihan Ekonomi Nasional Masa Pandemi Covid19”**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Nomor 16//Tahun 2022 Tanggal 16 Januari 2022 tentang Pengangkatan Tutor Pembimbing Taskap kepada para peserta PPRA LXIII dan Pembuatan Perumusan Judul Penetapan Judul Taskap peserta PPRA LXIII tahun 2022 Lemhannas RI dan Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 2 Tahun 2022 Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIII di Lemhannas RI tahun 2022. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Bapak Mayjend TNI Hayunadi selaku Pembimbing atau Tutor Taskap saya dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini. Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI. Termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan keberkahan dan bimabingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalaamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 4 Agustus 2022

Penulis



Dr. Sri Sundari, S.H., M.M.,CGCAE.

No. Peserta 082



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sri Sundari.,SH.,MM.,CGCAE.

Pangkat : Pembina Utama Muda / IV C

N I p : 196705281989022001

Jabatan : Inspektur

Instansi : DPD RI

Alamat : Jl. Penggalang Raya No. 1 Rt 7 Rw 3 Pramuka Kelurahan
Palmariam Kecamatan Matraman Jakarta Timur - DKI
Jakarta

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPR) LXIII Tahun
2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

2. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak
asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.
3. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 4 Agustus 2022

Penulis

(10000)

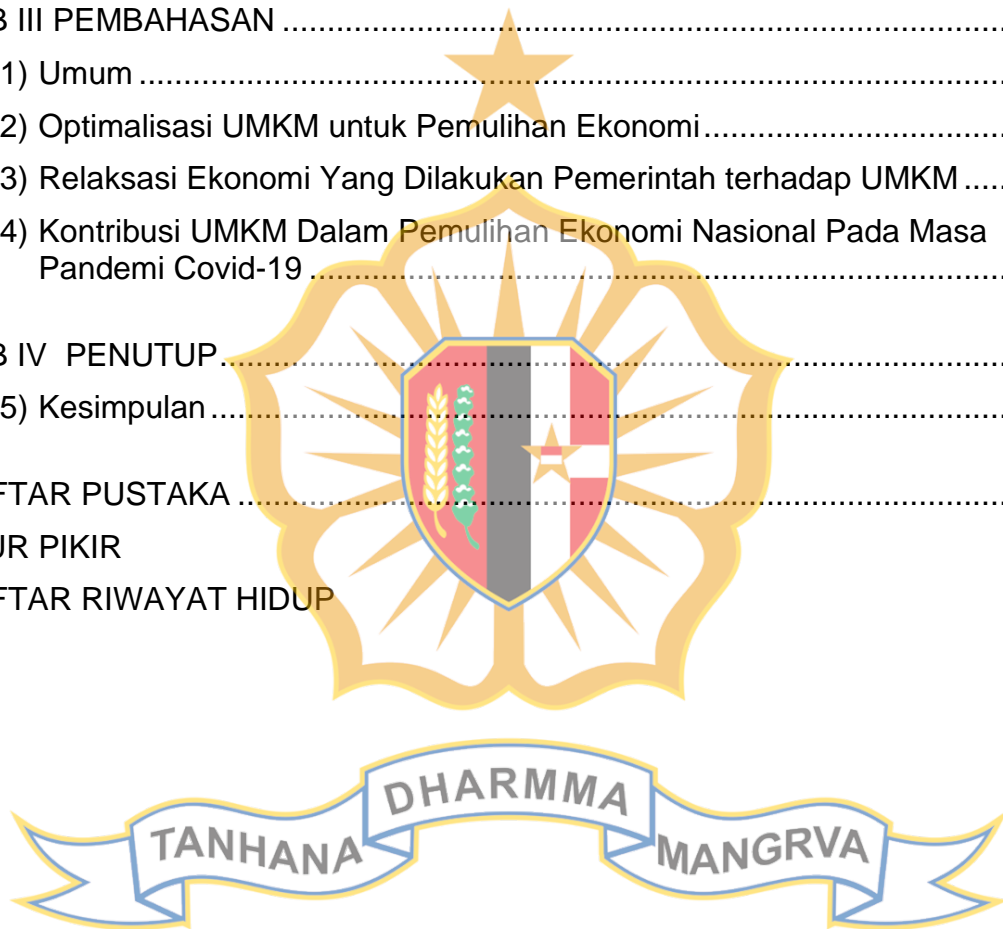
Dr. Sri Sundari.,SH.,MM.,CGCAE.

No. Peserta 082

DAFTAR ISI

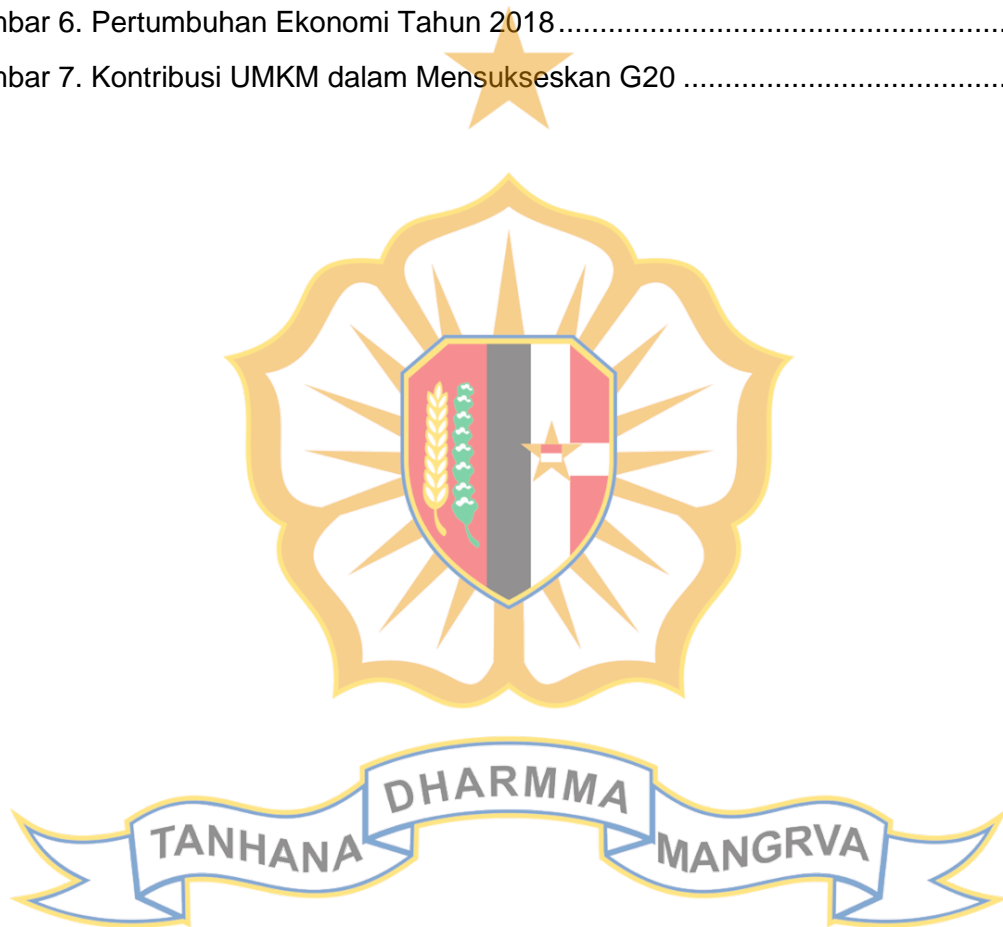
KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1) Latar Belakang.....	1
2) Rumusan Masalah	8
3) Maksud dan Tujuan	8
4) Ruang Lingkup dan Sistematika	8
5) Metode dan Pendekatan.....	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 12
6) Umum	12
7) Peraturan Perundang-Undangan.....	12
a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.....	12
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang.....	13
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.....	13
d. Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pemberdayaan Usaha Menengah	14
e. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional	14
f. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah	15
g. Peraturan Menteri Keuangan RI 24/PMK.02/2022 Tentang Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional	15
8) Kerangka Teoritis.....	16

a. Teori Ekonomi.....	16
b. Teori Kebijakan Publik	18
9) Data atau Fakta	19
10) Lingkungan Strategis	22
a. Lingkungan Internasional.....	22
b. Lingkungan Regional.....	22
c. Nasional.....	24
BAB III PEMBAHASAN	28
11) Umum	28
12) Optimalisasi UMKM untuk Pemulihan Ekonomi.....	28
13) Relaksasi Ekonomi Yang Dilakukan Pemerintah terhadap UMKM	36
14) Kontribusi UMKM Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19	44
BAB IV PENUTUP.....	50
15) Kesimpulan.....	50
DAFTAR PUSTAKA	53
ALUR PIKIR	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Data Perbandingan Kondisi Sebelum Pandemi dan Saat Terdampak Pandemi Covid-19	4
Gambar 2. Kontribusi UMKM	20
Gambar 3. Kontribusi UMKM	20
Gambar 4. Sektor UMKM.....	30
Gambar 5. Pelaku UMKM	35
Gambar 6. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018	49
Gambar 7. Kontribusi UMKM dalam Mensukseskan G20	49



BAB I PENDAHULUAN

1) Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 pada Pembukaan menegaskan seluruh elemen bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia majunya kesejahteraan umum adalah tugas Pemerintah Indonesia.¹ Bapak proklamator atau *founding father* Bangsa Indonesia telah mengarahkan rencana besar bagi seluruh anak bangsa dalam memajukan kesejahteraan. Upaya untuk dapat memajukan kesejahteraan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara dalam cakupan pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Indonesia terus digencarkan oleh pemerintah melalui Pembangunan secara merata dan menyeluruh.

Dimasa depan masyarakat harus mampu meningkatkan taraf hidupnya guna mendukung pembangunan nasional yang digencarkan oleh Pemerintah. Arah pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah bertujuan untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara nasional. Dalam mengukur tingkat keberhasilan pembangunan pada era globalisasi seperti ini pemerintah sangat mengandalkan pada sektor ekonomi yang menyeluruh di segala bidang.

Pembangunan secara nasional akan terlihat tidak baik dan kurang kuat apabila dilakukan tersentral dan belum seimbang serta dilaksanakan dengan belum seimbang dengan perkembangan sosial, politik dan ekonomi. Maka sebab itu, peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sebagai aktor utama serta pihak yang langsung merasakan hasil dari pembangunan tersebut. Indikator yang sering digunakan dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi adalah dengan tingkat pembangunan ekonomi. Hal penting yang harus terus dipandang utama oleh setiap negara adalah dengan melihat pembangunan ekonomi pada suatu negara, karena faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat yaitu dengan meningkatkan ekonomi masyarakat tersebut.

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Tingkat kesejahteraan masyarakat serta gambaran perekonomian suatu negara terlihat dengan pertumbuhan serta pendapatan perkapita masyarakat tersebut.

Memberikan peluang kepada masyarakat untuk dapat bekerja guna meningkatkan pertumbuhan barang dan jasa merupakan sebuah tujuan dari pembangunan ekonomi secara nasional. Dalam membangun ekonomi daerah maka dalam pelaksanaannya perlu melibatkan segala unsur, termasuk masyarakat serta pemerintah yang mengambil peran inisiator pembangunan.² Sementara itu, sebagai penunjang terciptanya pembangunan nasional yang kondusif, aman, dan tenteram maka pemerintah dan masyarakat perlu bersinergi untuk dapat mengarahkan dan melindungi para pelaku UMKM.

Pada kancah nasional perekonomian secara nasional diperankan oleh UMKM dalam membangun perekonomian nasional yang dimotori oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika dilihat Produk Domestik Bruto (PDB) terbentuk dari faktor dominan yaitu penyerapan tenaga kerja serta kontribusi pemasukan dari sektor UMKM. Dipandang dalam sudut lain bahwa UMKM didapati keunggulan untuk pemanfaatan sumber daya baik SDA maupun SDM, serta yang paling utama adalah pada ranah peternakan, perkebunan, pertanian, perdagangan serta banyak lainnya.

Sedangkan, para pengusaha yang lebih besar lebih mempunyai keunggulan untuk dapat mengolah berbagai industri seperti gas, listrik, komunikasi serta pertambangan. Oleh sebab itu usaha yang lebih besar memberikan gambaran untuk dapat saling menutupi kelemahan UMKM dan usaha besar seperti hal penyerapan tenaga kerja dimana UMKM lebih dominan, sehingga lebih baik dalam memberikan kontribusi pada pendapatan nasional.

Meskipun sering dianggap sebagai sektor penting dan berkontribusi besar guna mendukung perekonomian secara nasional, pengusaha UMKM masih mengalami banyak kendala. Mengutip Rencana Strategis Kemenkop UKM Tahun 2020-2024, permasalahan yang kerap dihadapi

² 'Pujiono, 2012 Akselarasi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Pendidikan, Proceeding Seminar Nasional Peningkatan Kapabilitas UMKM.'

pelaku UMKM yaitu seperti perizinan, biaya notaris dan lain sebagainya.

Para pengusaha mengaku bahwa sebanyak 72,47% merasakan kesulitan untuk dapat mengembangkan usaha UMKM dengan berbagai permasalahan. Pandemi Covid19 telah menyebar secara global dalam kurun waktu dua tahun lamanya, serta mampu melumpuhkan seluruh sendi-sendi kehidupan baik itu sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan, serta lain sebagainya. Negara diseluruh dunia terus bahu membahu untuk dapat melawan wabah Covid-19 dengan dilakukannya vaksinasi. Tanpa kecuali negara Indonesia, Pemerintah terus mendorong terciptanya Kesehatan yang baik untuk warganya sehingga dengan begitu dapat kembali beraktifitas dengan normal, tanpa mengabaikan Protokol Kesehatan yang sangat ketat.

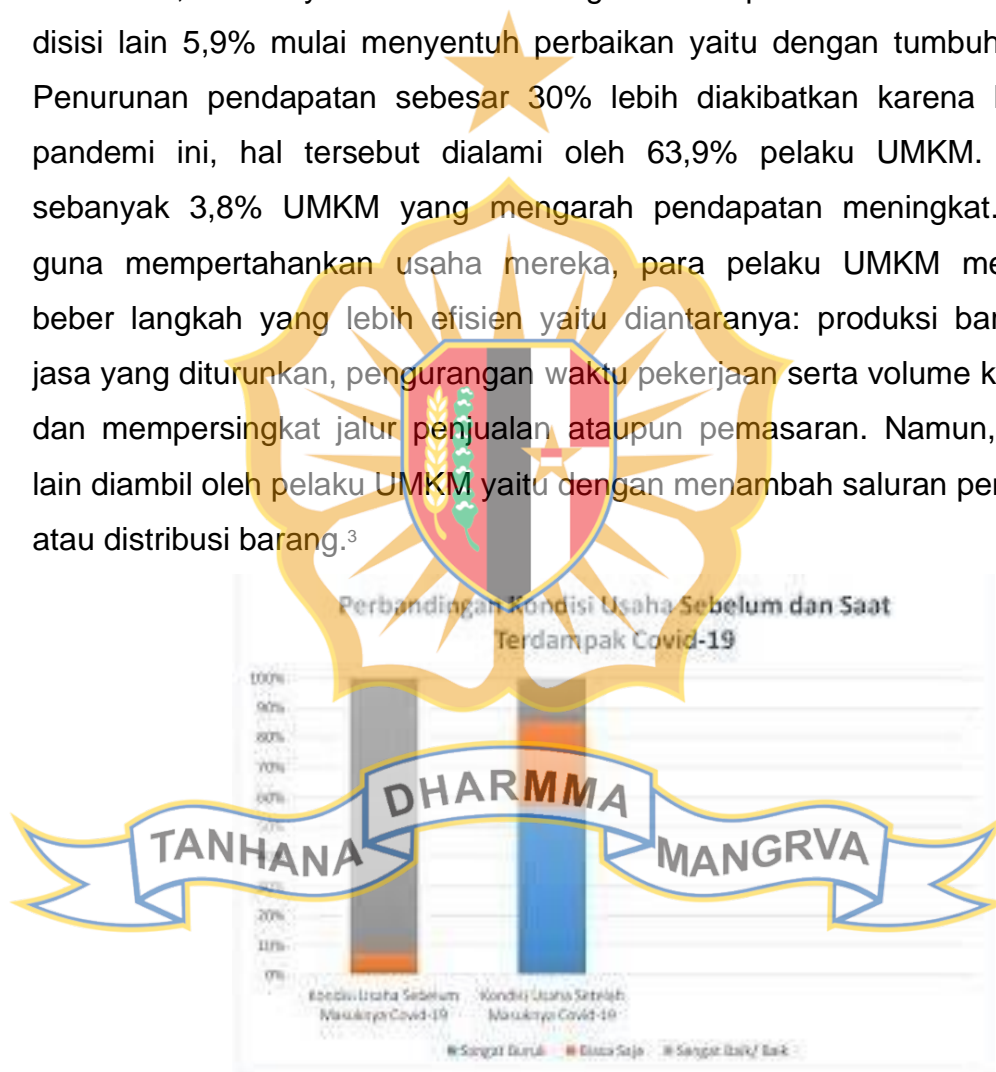
Akibat yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 tersebut, terlihat juga pengusaha dengan kategori kecil. Serta para pengusaha yang cukup berat mengalami penurunan akibat dari virus corona yang mengakibatkan pandemi yaitu dengan skala UMKM. Perkembangan pelaku UMKM yang mencapai 64.190.000 dengan daya tampung pengusaha kecil serta mikro (UKM) yang terlihat lebih unggul yakni sebanyak 64.130.00 atau 99,92% dari total seluruh UMKM tersebut. Kelompok usaha tersebut juga terkena dampak yang kurang baik dari serangan Covid-19.³

Keadaan perekonomian Indonesia mengalami penurunan selama 2 tahun terakhir juga menyebabkan kontribusi UMKM terhadap pendapatan nasional mulai 2 tahun terakhir mengalami penurunan. Bukan karena hal tersebut saja, jika merujuk pada hasil survei Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebanyak 72.983 tenaga kerja mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 di 34 provinsi pada kuartal sampai dengan November 2021.⁴

Perhatian khusus perlu diberikan oleh Pemerintah pada sektor UMKM dalam “menyelamatkan diri” dari krisis yang terjadi. Mengingat bahwa UMKM merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) serta menjadi sektor utama untuk menyerap pekerja serta mengganti barang setengah jadi atau barang produksi. Prediksi di tahun 2022 bahwa melihat pandangan yang lebih baik

bahwa UMK menuju kearah yang lebih baik. Terutama ditengah sentiment kondisi ekonomi yang diperkirakan akan lebih baik pada tahun 2022 ini, momentum kebangkitan tumbuhnya ekonomi harus mampu dimanfaatkan oleh UMKM agar dapat kembali eksis dalam dunia usaha.

pada grafik 1 dibawah ini dapat terlihat, Katadata Insight Center (KIC) melakukan survei kepada pelaku UMKM sebanyak 206 yang tersebar di wilayah Jabotabek yang menghasilkan data bahwa sebagian besar UMKM 82,9% menyentuh imbas kurang baik dari pandemi covid-19, namun disisi lain 5,9% mulai menyentuh perbaikan yaitu dengan tumbuh positif,. Penurunan pendapatan sebesar 30% lebih diakibatkan karena keadaan pandemi ini, hal tersebut dialami oleh 63,9% pelaku UMKM. Namun, sebanyak 3,8% UMKM yang mengarah pendapatan meningkat. Survei guna mempertahankan usaha mereka, para pelaku UMKM melakukan beber langkah yang lebih efisien yaitu diantaranya: produksi barangatau jasa yang diturunkan, pengurangan waktu pekerjaan serta volume karyawan dan mempersingkat jalur penjualan ataupun pemasaran. Namun, strategi lain diambil oleh pelaku UMKM yaitu dengan menambah saluran pemasaran atau distribusi barang.³



Sumber: Katadata Insight Center (KIC), 2020

Gambar 1. Data Perbanding Kondisi Sebelum Pandemi dan Saat Terdampak Pandemi Covid-19

³ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4750566/kemnaker-72983-pekerja-kena-phk-selama-pandemi-covid-19>

Badan Pusat Statistik, Bappenas dan World Bank melakukan survei dengan hasil bahwa pandemic Covid19 menimbulkan kesulitan bagi banyak UMKM untuk dapat menutup pinjaman serta membayar kewajiban seperti gas, listrik serta upah tenaga kerja. Dilain sisi terlihat juga banyak UMKM yang tidak segansegan untuk memutus hubungan kerja kepada karyawannya karena ketidakmampuan membayarkan upah serta operasional. Permasalahan tersebut kerap dihadapi oleh para pelaku UMKM dan juga permasalahan yang timbul bahwa UMKM kesulitan untuk mendapatkan modal usaha, menurunnya pelanggan, terhambatnya saluran distribusi dan produksi, serta mendapatkan bahan baku.

Adanya pembatasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dapat merubah kebiasaan konsumen serta juga merubah skema kompetisi bisnis, oleh karena itu para pelaku UMKM perlu mengantisipasi hal tersebut. Teknologi digital yang dimanfaatkan oleh konsumen lebih menarik untuk digunakan langsung guna mendukung aktivitas di dalam rumah. Skema persaingan bisnis serta gambaran industri mengalami perubahan yang dilandai dengan 4 model jenis yakni: *Hygiene, Low-Touch, Less Crowd* serta *Low-Mobility*.⁴

Memperhatikan keadaan yang saat ini ada, bahwa imbas sangat besar telah diabkitakan dengan adanya pandemic covid-19 kepada masyarakat pada strata menengah ke bawah, karena Sebagian besar pelaku UMKM berada pada kelas atau strata tersebut. Terlihat dalam masa pendemi tersebut bahwa pelaku usaha yang mampu bertahan adalah yang mampu melakukan adaptasi pada empat karakteristik tersebut. Inovasi yang dilakukan oleh pelaku UMKM dipandang perlu menyesuaikan diri dalam produksi sesuai kebutuhan pasar. Tumbuh serai berkembangnya segala bentuk pemikiran yang baru merupakan salah satu wujud jalan keluar atas permasalahan social ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi.

Wujud perubahan bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pengusaha UMKM adalah memanfaatkan pasar digital (*digital market*). UMKM harus

⁴ CNBC Indonesia, 28 April 2021

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, *e-commerce*, dan media sosial sehingga tetap mampu bersaing. Kenyataan yang disampaikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Menengah, dan Kecil sampai tahun 2021 besarnya pengusaha UMKM telah berada pada lingkungan baru di era digitalisasi sebesar 19% atau 12 juta UMKM. Pemerintah sendiri menargetkan sampai dengan 2024 setidaknya ada 30 pelaku UMKM yang telah digitalisasi (*go digital*).⁵

Sebagai contoh salah satu *e-commerce* Tokopedia mengatakan bahwa sejak awal pandemik sampai triwulan ke-3 tahun 2021 sebanyak 3,8 juta mengalami penambahan penjual baru serta 11 juta kategori UMK yang menyebar keseluruh Indonesia, hal tersebut dialami oleh Tokopedia. Total produk UMKM yang dijual di seluruh Indonesia sendiri sebanyak 550 juta produk.⁶

Pada tempo waktu kuartal IV/202 indeks gambaran BMSI mengalami perubahan yang semula 105,4 menjadi 128,0, hal tersebut memperlihatkan data yang membuat para pelaku UMKM lebih optimistis gambaran yang lebih baik. Sehingga secara umum gambaran tersebut memberikan sinyal positif membaiknya perekonomian nasional. Jika dilihat pada kuartal IV/2020 perubahan juga terjadi dari 90,2 menjadi 115,5 dari sisi ISB. Kondisi yang juga lebih baik diperlihatkan dengan meningkatnya IAB, IEAB, dan ISB sehingga keyakinan akan kondisi lebih baik dapat dijalankan oleh para pelaku UMKM menuju keadaan yang lebih baik.⁷

Keyakinan pada kondisi yang lebih baik tergambar oleh beberapa hal, yakni: Kesatu, gencarnya pelaksanaan vaksinasi yang dapat menurunkan angka infeksi covid 19, sehingga masyarakat dapat beraktivitas. Kedua, perayaan imlek serta hari raya Idul Fitri membuat permintaan produksi barang meningkat guna melengkapi kebutuhan masyarakat. Ketiga, naiknya harga komoditas akibat panen raya pada sejumlah daerah. Keempat, pelaku usaha property dan pembelian rumah baru yang mendapatkan program relaksasi dari pemerintah.

⁵ '://kemenkopukm.go.id/read/ri-kejar-30-juta-umkm-go-digital-hingga-2024

⁶ <https://www.antaraneews.com/berita/2396829/tokopedia-catat-peningkatan-jumlah-umkm-selama-pandemi>

⁷ Bisnis Indonesia, 17 Mei 2021.

Di lain sisi terlihat bahwa pemerintah memfokuskan program pada sektor-sektor kegiatan didaerah dalam pelaksanaan program pembangunan nasional dan daerah. Kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, pengusaha swasta serta *stakeholder* lainnya, yang bertujuan pada pertumbuhan di beberapa sektor yang memiliki peluang besar. Sehingga berkembangnya satu bidang dengan bidang yang lainnya diharapkan terangsang lebih cepat dan efektif.

Bapak Lukmanul Hakim (staf khusus wapres Bid. Ekonomi dan keuangan) memberikan arahan bahwa Bapak Wapres RI lebih memfokuskan usaha mikro sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan serta UMKM yang berdaya. (antaranews.com). Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah perlu menggalakkan konsep tradisional atau modern pada jenis usaha kecil UMKM yang dipandang sebagai jalan keluar untuk dapat perekonomian semakin meningkat.

Mudahnya pinjaman yang diberikan kepada pelaku UMKM yang bertujuan untuk peningkatan tumbuhnya pelaku usaha mikro pemerintah menerbitkan aturan berupa pelaksanaan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), yang disalurkan melalui LPDB Koperasi dan UMKM. Pembiayaan atau pendanaan dipastikan tersalurkan secara cepat dan tepat khususnya bagi para pelaku UMKM dilaksanakan melalui program PEN kurang terintegrasinya para pelaku UMKM yang ada menjadi sebuah masalah tersendiri untuk menyalurkan program PEN tersebut. Di sisi lain bahwa, rancangan untuk dapat mendorong UMKM menggunakan sarana Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bersubsidi layak mendapatkan apresiasi, dengan melihat kenyataan bahwa banyak UMKM yang belum mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan.

Penulis membuat Tulisan dengan Kajian Pustaka yang mendalam guna menyelamatkan keberlangsungan kehidupan UMKM. Maka atas dasar fenomena tersebut penulis mengajukan judul yaitu **“Optimalisasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Guna Pemulihan Ekonomi Nasional Masa Pandemi Covid 19”**.

2) Rumusan Masalah

Fenomena telah disampaikan pada latar belakang penulisan Taskap diatas, “**Bagaimana Optimalisasi Kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Guna Pemulihan Ekonomi Nasional Masa Pandemi Covid-19**”. Dari Pokok Masalah tersebut ada beberapa pokok persoalan yang ditemukan, dan menjadikan pertanyaan kajian adalah:

- a. Bagaimana optimalisasi UMKM guna meningkatkan pemulihan ekonomi?
- b. Bagaimana Penanganan Relaksasi ekonomi yang dilakukan pemerintah terhadap UMKM?
- c. Bagaimana kontribusi UMKM untuk pemulihan ekonomi Nasional pada masa pandemi (Pandemi Covid) ?

3) Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud untuk pembuatan Kertas Karya Persorangan (Taskap) adalah memenuhi syarat keikutsertaan dalam program PPRA Lemhanas RI. memberikan gambaran tentang meningkatkan Optimalisasi UMKM Guna Pemulihan Ekonomi Nasional Masa Pandemi Covid-19.

b. Tujuan

Tujuan dari pembuatan tulisan Taskap merupakan sumbangan rumusan kebijakan dalam upaya Optimalisasi UMKM Guna Pemulihan Ekonomi Nasional Masa Pandemi Covid-19.

4) Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam penulisan taskap ini difokuskan pada Optimalisasi UMKM Guna Pemulihan Ekonomi Nasional Masa Pandemi Covid-19.

b. Sistematika

Sistematika dalam pembahasan penulisan Taskap ini meliputi tempat bab yang terdiri atas :

1) BAB I Pendahuluan

Bab penjabaran tentang meningkatkan Optimalisasi UMKM Guna

Pemulihan Ekonomi Nasional Masa Pandemi Covid-19. Dari latar belakang ini ditemukan masalah dan pokok-pokok persoalan. Kemudian disampaikan maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metoda dan pendekatan, serta pengertian.

2) BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini, merupakan kumpulan pustaka yang digunakan sebagai sumber rujukan dan sebagai alat untuk menganalisis objek menjadi landasan pemikiran adalah Pancasila sebagai landasan idiil, UUD NRI 1945, Wawasan Nusantara sebagai landasan visional, Pembangunan Nasional sebagai landasan Konsepsional. Landasan berikutnya adalah Peraturan Perundang-Undangan sebagai landasan teori dan tinjauan pustaka. yaitu Eksternal dan Internal yang relevan dan berpengaruh terhadap Optimalisasi UMKM Guna Pemulihan Ekonomi Nasional Masa Pandemi Covid-19.

3) BAB III Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang kondisi UMKM pada saat ini serta UMKM terhadap penguatan Daya Saing Bangsa dan Pembangunan Nasional. Menguraikan tentang kondisi UMKM yang diharapkan, analisis Optimalisasi UMKM Guna Pemulihan Ekonomi Nasional Masa Pandemi Covid-19. Membahas mengenai upaya mewujudkan UMKM, strategi Kebijakan dirumuskan untuk memberikan arah agar strategi dan upaya dalam mewujudkan UMKM Guna Pemulihan Ekonomi Nasional Masa Pandemi Covid-19.

4) BAB IV Penutup

Bab ini bagian terakhir dari Taskap ini adalah penutup menjabarkan sebuah kesimpulan dan saran dan rekomendasi hasil dari sebuah kebijakan.

5) Metode dan Pendekatan

Analisis deskriptif digunakan dengan metode pendekatan kualitatif digunakan dalam Menyusun Taskap ini dengan merujuk pada studi kepustakaan. Pendekatan penelitian ini dilandaskan dengan pemikiran secara nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

mempertimbangkan factor lingkungan strategis sebagai pisau analisis Pembangunan Nasional.

5) Pengertian

a. Optimalisasi

Menekan biaya merupakan sebuah tujuan optimalisasi yang merupakan sebuah proses mencari jalan keluar yang layak, yang tidak mengedepankan keuntungan yang tinggi semata-mata.⁸ Tujuan, Alternatif Keputusan serta Sumberdaya yang dibatasi merupakan tiga factor masalah optimalisasi yang harus teridentifikasi.⁹

b. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Setiap instansi dan Lembaga memiliki pengertian atau definisi yang berbeda tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mentafsirkan berbeda. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro
Adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- 2) Usaha Kecil
Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang;
- 3) Usaha Menengah
Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai ataupun

⁸ Siringoringo, Hotniar. 2005. Riset Operasional Seri Pemrograman Linear. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 5

⁹ Machfud Sidik. 2001. Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Hal. 8

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau usaha besar dalam jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

c. Daya Saing

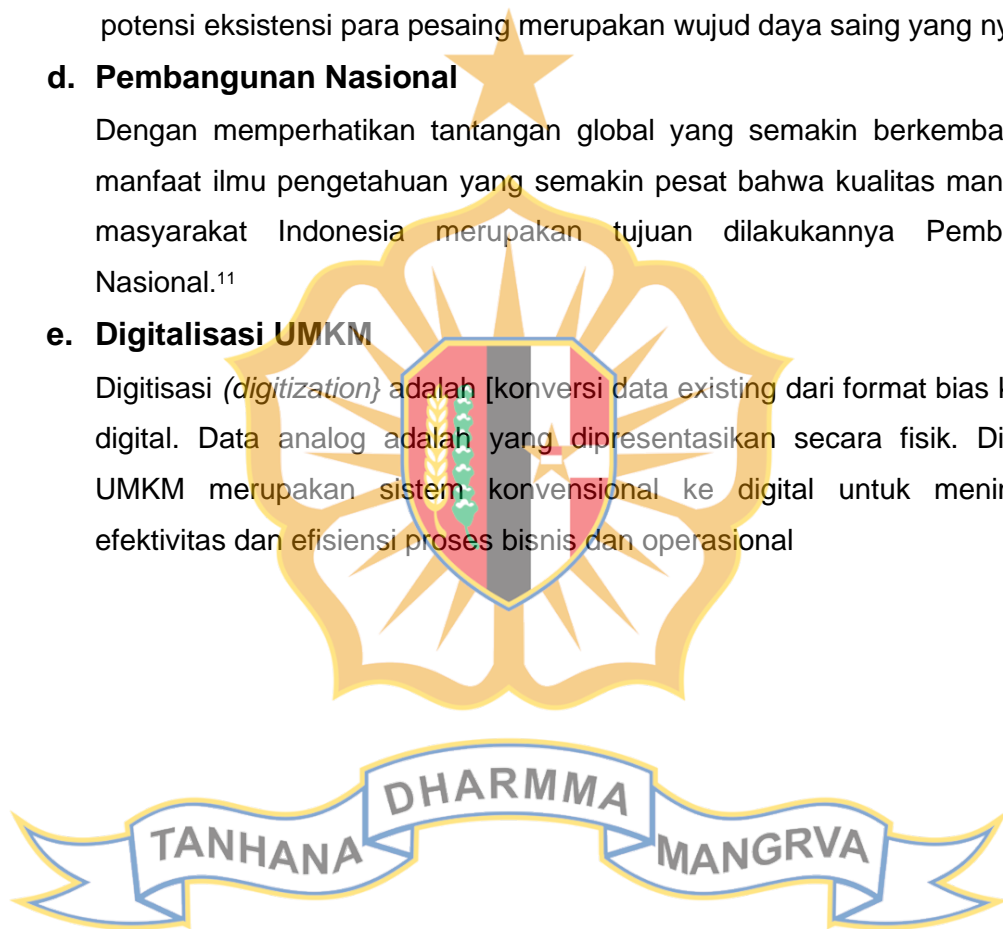
Segala kemampuan serta kekuatan yang dimiliki sebagai bentuk keunggulan untuk dapat mempertahankan diri, serta potensi diri dengan segala sumber daya yang dimiliki. Dapat melawan gangguan, bahaya serta meminimalkan potensi eksistensi para pesaing merupakan wujud daya saing yang nyata.¹⁰

d. Pembangunan Nasional

Dengan memperhatikan tantangan global yang semakin berkembang serta manfaat ilmu pengetahuan yang semakin pesat bahwa kualitas manusia dan masyarakat Indonesia merupakan tujuan dilakukannya Pembangunan Nasional.¹¹

e. Digitalisasi UMKM

Digitisasi (*digitization*) adalah [konversi data existing dari format bias ke bentuk digital. Data analog adalah yang dipresentasikan secara fisik. Digitalisasi UMKM merupakan sistem konvensional ke digital untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis dan operasional



¹⁰ Frinces, Z. Heflin. 2011. *Be An Entrepreneur (Jadilah Seorang Wirausaha) Kajian Strategis Pengembangan Kewirausahaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 60

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

6) Umum

Perumuskan Konsepsi Ketahanan Nasional yang tangguh membutuhkan “Ekonomi Berbasis Konstitusi” yaitu pelaksanaan Pembangunan Ekonomi yang mengandung Idil, yakni Nilai-Nilai Pancasila seperti telah melekat secara permanen dalam pembukaan konstitusi negara UUD NRI Tahun 1945, terutama dalam bidang kesejahteraan rakyat, pada pasal 33 dijelaskan:

- a. Asas kekeluargaan digunakan sebagai dasar penyusunan perekonomian nasional;
- b. Dalam menghidupi hajat hidup orang banyak, Pemerintah sebagai Wakil negara memiliki peran vital dalam mengelola unit-unit produksi;
- c. Kemakmuran masyarakat banyak dengan sebesar-besarnya diberikan negara melalui terkelolanya seluruh potensi dan kekayaan negeri didalamnya.

Pada pasal tersebut telah terang benderang dijelaskan bahwa seluruh kepemilikan kekayaan sumber daya alam dimanfaatkan pengelolaannya dan hasilnya digunakan semata-mata demi kemakmuran rakyatnya. Sementara dalam implementasinya juga dengan memperhatikan Astagrata (“trigatra: Geografi, Demografi, Sumber Kekayaan Alam; Pancagatra, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam”).¹²

7) Peraturan Perundang-Undangan

Terkait dengan optimalisasi UMKM pemerintah telah menetapkan beberapa regulasi atau perangkat hukum yang menjadi rambu-rambu dalam pelaksanaannya, adalah :

a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Pemerintah memiliki kewajiban untuk dapat menentukan arah

¹² Lemhanas, RI. Materi Pokok Bidang Studi Ekonomi, 2017, hal.22-23.

pembimbingan, perlindungan serta suasana yang kondusif sebagai penunjang terciptanya iklim ekonomi yang baik. Hal tersebut, dapat mendukung terciptanya tujuan Pembangunan Nasional sehingga antara masyarakat dan pemerintah saling mendukung melengkapi satu sama lain antara masyarakat dan kegiatan Pemerintah saling menunjang. Sektor ekonomi dengan prinsip kualitas SDM yang berpijak pada fokus pemerataan, tumbuh dan stabil dilaksanakan guna mencapai tujuan pembangunan nasional di berbagai bidang.

Pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dampak dari meningkatnya pembangunan ekonomi beimbias pada meningkatnya kesejahteraan rakyat serta juga tumbuh kembangnya UMKM serta koperasi. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan potensinya guna terwujudnya Pembangunan Nasional. Tumpuan utama pelaku usaha kecil yaitu dengan mengandalkan pelayanan ekonomi secara maksimal sehingga dapat memperluas lapangan pekerjaan hal tersebut dapat membantu terjaganya kestabilan secara nasional mupun secara ekonomi.

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Pengembangan UMKM usaha mikro kecil menengah sangat dibutuhkan masyarakat mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian domestik. UMKM akan berkembang secara terintegrasi dan modernisasi melalui agibisnis dan argobisnis, mendukung ketahanan pangan juga di butuhkan pengembangan rumpun industri sangat dibutuhkan percepatan alih teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

Peranan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi

dagang, dan dukungan kelembagaan. Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM. Jika UMKM mempunyai kelemahan di bidang produksi, tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan UMKM dengan berbagai cara. Peran pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Dan peran pemerintah daerah sebagai katalisator pengembangan UMKM adalah mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi *fast moving enterprise*. *Fast moving enterprise* merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar.

d. Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pemberdayaan Usaha Menengah

Presiden menginstruksikan kepada Para Menteri dan Menteri Negara seluruh Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur serta Bupati/Walikota, sesuai dengan ruang lingkup tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri melaksanakan Pemberdayaan usaha menengah yang meliputi bidang-bidang yaitu

1. Pembiayaan;
2. Pemasaran ;
3. Teknologi;
4. Sumber daya manusia;
5. Perizinan.

e. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Mayoritas masyarakat Indonesia dalam meningkatkan taraf hidupnya dengan upaya strategis yaitu untuk menumbuhkembangkan para pengusaha Koperasi dan UMKM. Kapasitas kelembagaan yang kokoh menjadi tujuan pemberdayaan, serta pengembangan UMKM yang tertuang dalam RPJMN 2005-2025, pemberdayaan koperasi dan UMKM dibagi menjadi pengembangan usaha mikro, dan penguatan

kelembagaan koperasi.

f. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah

RPJPN 2005-2025 memasuki tahapan ke IV yaitu RPJMN 2020- 2024 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilihan Umum Tahun 2019. RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari RPJPN 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

g. Peraturan Menteri Keuangan RI 24/PMK.02/2022 Tentang Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan salah satu sumber anggaran yang pengelolaannya ditujukan untuk penanganan pandemic covid 19, terdiri atas pengalokasian anggaran, perubahan dan pergeseran anggaran, dan penandaan anggaran dan pelaporan. Dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, Pemerintah melalui Komite menyusun kebijakan dan strategi penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Program PEN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai komite penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan dan strategi penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Program PEN, menjadi dasar pengalokasian

anggaran dalam APBN untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Program PEN. Pengalokasian anggaran termasuk atas kegiatan/belanja reguler Kementerian/Lembaga, yang bersumber dari insentif perpajakan, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Kementerian/Lembaga dan BUN dapat mengajukan usulan perubahan dan/atau pergeseran anggaran kepada Kementerian Keuangan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Program PEN.

Airlangga Hartanto sebagai Menko Perekonomian mengatakan di Jakarta tanggal 11 Februari: untuk meneruskan pemulihan ekonomi, didalam negeri sendiri Pemerintah siap mengelontorkan dana sebagai PPC dan PEN dengan besaran anggaran 455.62 triliun rupiah yang direncanakan cair pada tahun 2022. Program PEN diharapkan akan memulihkan dengan cepat para pengusaha UMKM yang terdampak pandemic. Selain itu, beban para debitur dapat diuraikan atau dikurangi dengan adanya restrukturisasi kredit. Makroprudensial menjadi program yang didorong Pemerintah sebagai jalur untuk memperluas rasio pembiayaan Inklusif, dengan adanya program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas krdit UMKM menjadi 20 persen di tahun 2022 dan 30 persen di tahun 2024.

8) Kerangka Teoritis

a. Teori Ekonomi

Pada suatu negara pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat secara berkala dan jangka Panjang yang disediakan oleh negara baik secara barang maupun jasa. Peningkatan kemampuan atau kapasitas dilihat tidak berdiri sendiri terdapat beberapa elemen yang menentukan diantaranya adalah penggunaan teknologi terbaru, instansi yang besar, ideologi yang dapat menjawab tantangan permasalahan yang ada didepan. (Todaro, 2007:82). Setiap negara Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan cara membandingkan, misalnya untuk ukuran nasional, *Gross National Product (GNP)* tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya.

1) Pertumbuhan ekonomi dilihat dari beberapa Faktor adalah sebagai berikut :

- a) Faktor individu. Individu pelaku sebagai ekonomi sebagai wujud faktor terpenting dalam tahap membangun.
- b) Faktor Sumber Daya Alam. Semua yang terkandung di alam seperti kekayaan maritim, hasil tambang, tanah yang subur, mineral merupakan elemen penting bagi negara berkembang untuk berpijak melangsungkan roda kehidupan bernegara.
- c) Faktor IPTEK Berkembang pesatnya dunia pengetahuan dan teknologi menjadi sebuah dorongan untuk lebih cepatnya proses pembangunan, pergantian pola kerja, serta sudah dimulai penggantian tenaga manusia kepada tenaga mesin. Pergantian secara mesinisasi menjadikan produksi lebih efektif dan efisien. Serta menjaga kuantitas dan kualitas produk tersebut.
- d) Faktor budaya merupakan sebuah faktor lain yang dapat memberikan dampak pada pembangunan nasional. Perkembangan budaya yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat menjadi pendorong namun juga dapat sebagai penghambat terciptanya pembangunan nasional. Guna memberikan dukungan kepada Program Pembangunan Nasional diharapkan kepada setiap individu untuk dapat bekerja lebih keras lagi. Namun, dalam setiap pelaksanaannya hambatan tentu hadir, hambatan yang kerap timbul adalah korupsi, kolusi dan nepotisme, serta sikap egois dan sikap anarkis.
- e) Sumber Daya Modal. Guna meningkatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta mengolah individu yang berkualitas dibutuhkan sumber daya permodalan yang besar. Dengan adanya dukungan permodalan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas barang dan jasa.

2) Pelaku Kegiatan Ekonomi

a) Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan pemilik dari berbagai faktor produksi yang ada dalam perkembangan dimana sektor ini menyediakan tenaga kerja, barang modal, kemampuan (skill), kekayaan alam yang dimiliki

dan harta lainnya.

b) Perusahaan

Perusahaan merupakan suatu organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dalam rangka menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Kegiatan mereka dalam perekonomian ialah mengorganisasikan factor produksi yang tersedia dengan sedemikian rupa dengan tujuan supaya kebutuhan rumah tangga akan barang dan jasa dapat diproduksi dengan baik.

c) Pemerintah

Pemerintah adalah badan pemerintah yang tugasnya mengatur kegiatan ekonomi, termasuk disalamnya yaitu departemen pemerintah. Dimana badan tersebutlah yang nantinya mengatur bagaimana penanaman modal, baik sentral dalam Bank Indonesia, pemerintah daerah, TNI/Polri.

b. Teori Kebijakan Publik

Edward III mengembangkan model implementasi kebijakan dengan pertanyaan "Apakah prakondisi Edward III menjawab pertanyaan tersebut dengan mengemukakan empat penyebab faktor kritis sebagai elemen pembentuk kebijakan public, yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi atau Sikap serta Struktur Birokrasi. Edward III menjelaskan variabel-variabel tersebut sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan akan apa yang diimplementasikan adalah sebuah pengetahuan yang tidak bisa lepas dari para implementor yang bertanggung jawab langsung terhadap pembuat kebijakan. Secara hierarki garis instruksi harus lebih jelas, akurat, tepat dan konsisten. Agar dapat terdistribusi dengan baik kepada para pemegang komando.
- 2) Setiap implementor harus memiliki kapasitas untuk dapat melaksanakan kebijakan dengan baik dan efektif. Dalam implementasi kebijakan para pelaksana biasanya dapat melakukan seleksi dengan baik, sebagai bentuk kapasitas diri yang layak. Sikap independent atau bebas menjadi salah satu syarat dari atasan agar dapat merusmuskan segala bentuk kebijakan. Secara organisasional serta individu sikap dan pandangan

para implementor sedikit banyak dapat mempengaruhi setiap kebijakan.

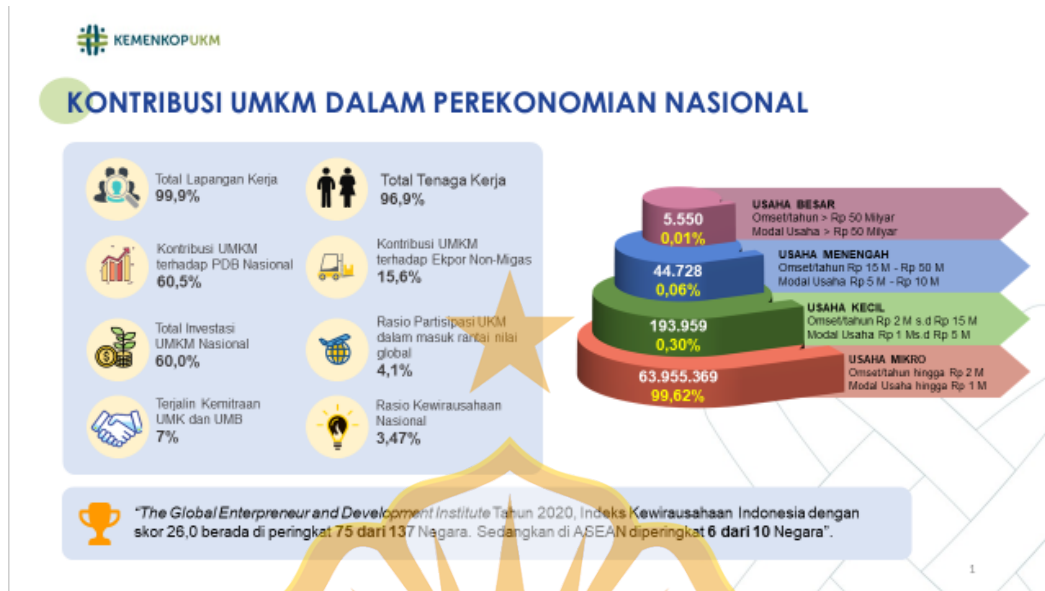
Implementor berfungsi untuk dapat mengerti dan menjabarkan setiap isi kebijakan, hal tersebut bermakna bahwa telah terciptanya komunikasi efektif sehingga fungsi komunikasi dapat tercipta dengan jelas. Edward III menjelaskan bahwa pertama para pelaksana kebijakan harus mengetahui suatu sebuah keputusan serta mengetahui apa yang harus dikerjakan. Pada saat pelaksanaan segala bentuk keputusan kebijakan ada baiknya harus dikomunikasi kepada pimpinan. Akurasi dan komunikasi dibutuhkan dalam mengimplementasikan segala bentuk kebijakan.

Hal lain perlu menjadi perhatian pada sebuah proses implementasi kebijakan yang dijabarkan oleh Sunggono (1994:147) yaitu segala bentuk penetapan kebijakan perlu dikomunikasikan serta menjadi topik pembicaraan. Jika dilihat dari sisi tersebut, para implementor sebagai pelaku diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk dapat membaca kebijakan serta pengetahuan untuk dapat melaksanakan kebijakan. Oleh sebab itu, secara substansi pelaksanaan kebijakan tidak lepas dari faktor komunikasi para implementor. Sejalan dengan hal tersebut, Edward III (2003:19) mengemukakan apabila menginginkan ketepatan sebuah kebijakan dapat diimplementasikan, maka perlu adanya ukuran dalam hasil implementasi tersebut bukan hanya sekedar implementasi tersebut diterima secara tepat, namun perlu adanya kejelasan dari para implementor sehingga tidak menjadi rancu dengan pelaksanaan serta kewenangan.

9) Data atau Fakta

Persaingan di pasar domestic serta global yang semakin ketat, para pelaku UMKM perlu mempersiapkan diri untuk dapat bekerjasama pada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Instansi Daerah, Instansi Perbankan, *Fintech*, *Marketpalce*. Kerjasama tersebut juga mengarah pada kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sebagai contoh salah satu *e-commerce* Tokopedia mengatakan bahwa sejak awal pandemik sampai triwulan ke-3 tahun 2021 Tokopedia telah menambah hampir 3,8 juta

penjual baru dengan 11 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Total produk UMKM yang dijual di seluruh Indonesia sendiri sebanyak 550 juta produk.¹³



Sumber: Paparan KeMenKoPUKM, 24 Juni 2022

Gambar 2. Kontribusi UMKM



Sumber: Paparan KeMenKoPUKM, 24 Juni 2022

Gambar 3. Kontribusi UMKM

¹³ <https://www.antaranews.com/berita/2396829/tokopedia-catat-peningkatan-jumlah-umkm-selama-pandemi>.

Rasa optimistis terus berkembang, pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan perkembangan yang membaik pada indeks ekspektasi BMSI yang merujuk pada angka 128.0 yang sebelumnya hanya pada angka 105.4 di kuartal IV/2020. ISB pelaku UMKM meningkat signifikan menjadi 115,5 dari sebelumnya 90,2 pada kuartal IV/2020. Kenaikan IAB, IEAB, dan ISB menunjukkan mulai berputarnya aktivitas UMKM di lapangan, tingginya optimisme mereka atas kondisi yang lebih baik.¹⁴

Penyaluran permodalan dana PEN atau dukungan UMKM secara khususnya, bahwa dana dukungan belum disalurkan secara cepat dan tepat sasaran. Karena ada syarat syarat berupa jaminan sertifikat rumah sebagai sarat untuk pinjaman ke Bank. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah para UMKM tidak memiliki sertifikat sebagai jaminan pinjaman ke Bank. Serta kurang terintegrasinya data UMKM yang ada. Permasalahn yang timbul skema dukungan UMKM melalui subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) juga belum berjalan dengan baik.

Dari pengalaman empiris penulis bahwa para pelaku UMKM terbentur dengan syarat yang ditetapkan oleh perbankan akibatnya para UMKM tidak bisa mengakses dana dari pemerintah tersebut. Akhirnya para UMKM meminjam dari Pinjol (pinjaman Online) dan Bank Keliling atau lintah darat untuk meneruskan usaha mereka. Hal ini sangat meresahkan para pelaku UMKM. Harapan kedepan agar pemerintah dan pihak perbangkan dapat menjadi jembatan antara para pelaku UMKM dengan pihak pemodal untuk dukungan usaha para UMKM.

Akibat Krisis Pandemi Covid 19 timbul permasalahan baru bagi para pelaku UMKM, diantara persoalan tersebut adalah krisis permodalandan krisis percaya diri. Permodalan sudah tidak bisa dihindari mengingat para pelaku UMKM tersebut hanya untuk menyambung keberlangsungan hidup keluarganya. Bagi para UMKM tersebut hari ini mereka bearjualan hari ini

¹⁴ Bisnis Indonesia, 17 Mei 2021.

juga mendapatkan uang dan makanan buat keluarganya. Masalah baru timbul tatkala pinjaman online tidak terbayarkan maka mereka akan meminjam ditempat lain seperti kredit uang Bank keliling atau lintah darat. Bagi organisasi pemerhati UMKM hal ini sangat memperhatikan. Oleh sebab itu penggiat organisasi UMKM melakukan usaha Bersama organisasi P3DI untuk menghimpun dana dari para pemerhati UMKM dan disalurkan kepada penggiat UMKM yang terjerat pinjaman online dan lintah darat tersebut

10) Lingkungan Strategis

Lingkungan Strategis yang diwarnai, dipengaruhi, serta dampak dari sebuah Fenomena Global yakni:

a. Lingkungan Internasional

Negara yang lebih maju mempengaruhi lebih tinggi yang saat bersamaan margin antara kekuatan ekonomi dengan militer semakin kuat, maka kebebasan antar negara semakin menguat. Demi kepentingan nasional terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh negara berkembang perlu dipergunakan dengan seksama, hal ini dikarenakan guna memperkuat ketahanan nasional negara berkembang tersebut. Oleh sebab itu, proses perumusan kebijakan nasional menjadi sebuah bayangan cenderung (analisis) pada lingkungan strategis global dan regional yang bersifat mendasar perlu dikemukakan.

b. Lingkungan Regional

Percaturan serta perkembangan politik negara-negara di ASEAN sedikit banyak terpengaruh oleh beberapa negara diluar ASEAN. Hal tersebut karena intensitas komunikasi negara-negara ASEAN dengan negara-negara diluar ASEAN sehingga dapat merubah dinamika geopolitik negara-negara di ASEAN. Menjadi sebuah catatan yang logis apabila negara-negara yang etrbagung organisasi ASEAN menghimpun sebuah kekuatan yang Bernama ASEAN Regional Forum (ARF), karena negara-negara seperti Jepang, India, Amerika Serikat, Australia serta China tidak dapat disepelekan dalam mempengaruhi wilayah-wilayah di Kawasan Asia Tenggara.

Kondisi politik negara-negara Asia Tenggara tidak akan lepas bicara tentang Indonesia, karena luas wilayah ASEAN duapertiganya adalah

sebuah wilayah Negara Indonesia. Sedangkan, duapertiga lainnya merupakan wilayah perairan yang secara hukum masuk wilayah Indonesia. Sehingga, kondisi keamanan yang stabil dalam kawasan Asia Tenggara dianggap layak perannya dimainkan oleh Indonesia. Keterlibatan banyak tokoh dengan kepentingan yang berbeda-beda dipandang cukup kompleks untuk menggambarkan sebuah kondisi geopolitik pada Kawasan ASEAN. Namun, tidak dapat dipungkiri, bahwa kompetisi geopolitik antar negara-negara di Asia Tenggara menjadi sebuah kekuatan lain guna memperkuat peran di Kawasan ini.

Bagi bangsa Indonesia sebuah stabilitas kawasan Asia Tenggara sangat vital pengaruhnya terhadap Indonesia karena dari sisi kedekatan geografi dapat cepat merembet ke dalam negara Indonesia. Jika dilihat secara potret strategis bahwa Indonesia pada posisi stabilitas di kompleks Asia Tenggara sebagai alasan yang sangat penting dan prioritas. Apabila dilihat lebih jauh, pemeliharaan stabilitas kawasan Asia Tenggara adalah hal yang luar biasa. Mengingat bahwa pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keamanan regional kawasan Asia Tenggara adalah 2 (dua) hal yang saling berpengaruh maka regionalisasi keamanan harus diikuti dengan regionilisasi ekonomi.

Situasi geopolitik kawasan Asia Tenggara dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

a) *Malaysia*

Melihat kondisi geopolitik, isu yang cukup penting untuk disikapi oleh Negara Malaysia adalah dengan menghadapi tantangan untuk tetap menjaga keutuhan setiap wilayah Malaysia terutama di semenanjung yaitu Sabah dan Serawak. Walaupun, hubungan baik tersu dikembangkan oleh Malaysia. Namun kondisi yang dialami Malaysia tetap saja sulit menjaga korelasi yang baik dengan negara tetangga, hal tersebut dipicu kurangnya rasa kepercayaan dari beberapa negara tetangga terhadap Malaysia. Bagi Indonesia, Malaysia termasuk sebagai mitra utama kerja sama ekonomi baik dari sisi perdagangan, investasi, dan pariwisata. Pada kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke-8 di Indonesia di bulan Februari 2021 yang lalu, kedua Kepala Pemerintahan membahas perlunya memperkuat kerja

sama bilateral khususnya dalam rangka pemulihan ekonomi dan mengatasi pandemi Covid-19 di kedua negara.¹⁵

b) **Singapura**

Pemerintah Singapura telah mengambil sejumlah langkah pencegahan penyebaran antara lain per 29 Januari 2020, warga negara RRT dengan paspor terbitan Provinsi Hubei atau warga negara asing tidak diizinkan masuk apabila mereka pernah melakukan perjalanan ke Hubei dalam waktu 14 hari.¹⁶

c) **Thailand**

Negara Thailand sebagai sebuah Negara yang dipandang penting pada Kawasan ASEAN. Stabilitasnya pada Kawasan darat dipandang lebih baik daripada dikawasan lautan negara tersebut, hal ini memberikan dampak pada kepentingan geopolitik negara Thailand. Dengan menjaga stabilitas negara-negara yang berada pada sekitar Thailand seperti Vietnam, Kamboja, Malaysia sudah dilakukan sejak dahulu. Wilayah perairan yang hanya menyangkut territorial saja menjadi domain utama negara Thailand.

c. **Nasional**

Pembangunan diketahui dengan aturan yang telah diuji serta rencana berbagai kebijakan yang telah dinilai. Ketahanan Nasional diproyeksikan akan meningkat dengan pencapain tingkat keberhasilan Sistem Manajemen Nasional yang berhasil dan meningkat setiap tahunnya, hal tersebut dapat dilihat dengan dinamika kondisi manifestasi kemampuan negara akan tetap eksis dan bertahan ditengah-tengah menghadapi ancaman dan gangguan yang dihadapi dengan ketahanan serta kemampuan bertahan bangsa memiliki keuletan, ketangguhan yang mumpuni.¹⁷

- 1) Lingkungan strategis nasional ditandai dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Demokratisasi, transparansi, menampung semua aspirasi serta memperkuat partisipasi masyarakat dengan landasan hukum yang

¹⁵ <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2930/berita/wujud-solidaritas-penanganan-covid-19-malaysia-serahkan-donasi-ke-indonesia>.

¹⁶ <https://kemlu.go.id/singapore/id/news/6271/informasi-terbaru-berkaitan-dengan-covid-19-di-singapura>.

¹⁷ Lemhanas, Bidang Sistem Manajemen Nasional, 2022

berlaku diperankan oleh pemerintah melambangkan bahwa tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

- b) Masyarakat atau rakyat mengharapkan adanya kepatuhan hukum yang pasti dan masa depan yang baik dengan keamanan nasional yang stabil.
- c) Di lingkungan strategis nasional keamanan nasional pada umumnya dihasilkan oleh: adanya kemampuan adaptasi pemerintah terhadap perubahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat yang semakin maju, indikator keamanan dalam negeri dapat dilihat dari indikator sosial politik, sosial ekonomi, sosial, budaya. Indikator sosial politik, antara lain digambarkan oleh besar kecilnya hak politik rakyat dan hak rakyat untuk memperoleh keadilan serta hak-hak asasi manusia lainnya. Indikator sosial ekonomi, antara lain digambarkan oleh adanya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan domestik bruto (PDB) atau pendapatan perkapita yang memadai disertai dengan pemerataan pendapatan yang baik sehingga masalah kesenjangan dapat diminimalkan tingkat korupsi dan kolusi rendah serta yang secara keseluruhannya disebut sebagai fundamental ekonomi yang kuat.
- d) Dapat dipahami dan dilihat bahwa belum pulihnya dunia dari Pandemi Global Covid-19 yang begitu mengguncang dunia, berdampak pada perekonomian di seluruh negara. Di Indonesia sendiri Pemerintah terus berusaha untuk dapat membangkitkan perekonomian dan geliat usaha yang sempat “mati suri”. Segala bentuk kebijakan dibuat dan diterapkan oleh Pemerintah dimulai dari pemberian Bantuan Sosial, Relaksasi Pajak hingga Bantuan Langsung Tunai. Namun, hal tersebut belum mampu memberikan stimulus yang baik, para pelaku usaha, karena masyarakat memiliki daya beli yang rendah. Rendahnya daya beli masyarakat mengakibatkan berkurangnya tingkat penjualan suatu produk, hal ini banyak dialami oleh para pelaku UMKM yang terpaksa serta mau tidak mau mengurangi tingkat produksi dan hingga akhirnya menutup usaha mereka.
- e) Pelaku usaha UMKM belum dapat menjangkau atau mengakomodasi

kebutuhan konsumen yang saat ini membutuhkan banyak produk baik dalam skala rumah tangga maupun perkantoran. Hal ini menjadi sebuah ancaman bagi para pelaku usaha bahwa konsumen akan terus memenuhi kebutuhannya pada produsen yang besar. Hal ini memicu tidak dapat berkembangnya pelaku UMKM dalam memproduksi produk. Kondisi sosial yang belum berubah tidak dapat dipungkiri bahwa jika tidak terselesaikan akan terus berlanjut.

2) Di lingkungan strategis nasional keamanan nasional pada umumnya dihasilkan oleh :

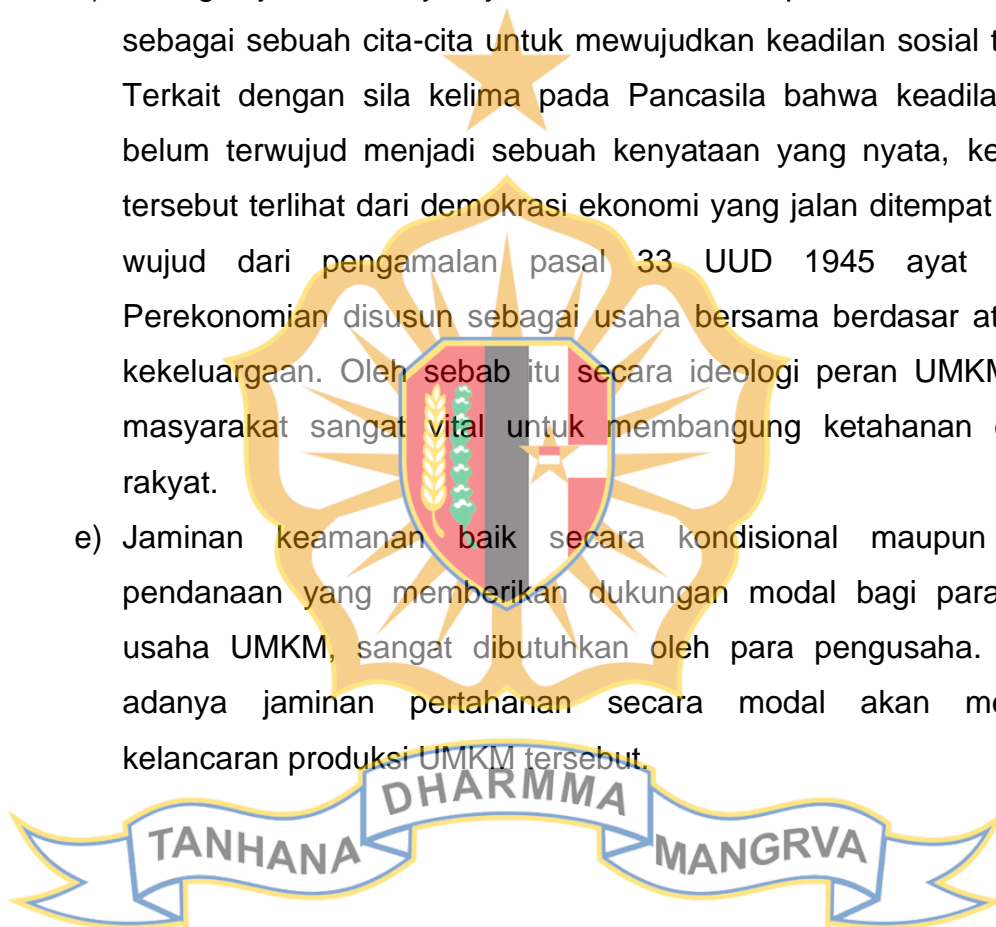
a) adanya kemampuan adaptasi pemerintah terhadap perubahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat yang semakin maju, indikator keamanan dalam negeri dapat dilihat dari indikator sosial politik, sosial ekonomi, sosial, budaya. Indikator sosial politik, antara lain digambarkan oleh besar kecilnya hak politik rakyat dan hak rakyat untuk memperoleh keadilan serta hak-hak asasi manusia lainnya. Indikator sosial ekonomi, antara lain digambarkan oleh adanya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan domestik bruto (PDB) atau pendapatan perkapita yang memadai disertai dengan pemerataan pendapatan yang baik sehingga masalah kesenjangan dapat diminimalkan. Indikator sosial ekonomi lainnya adalah mata uang yang memiliki nilai tukar yang cukup kuat, tabungan nasional dan tingginya sebuah cadangan devisa negara, kecilnya tingkat inflasi, rendahnya tingkat korupsi dan kolusi serta yang secara keseluruhannya disebut sebagai fundamental ekonomi yang kuat.

b) Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif. Untuk memperkuat kepastian masa depan bangsa, terutama dalam memasuki era persaingan antarbangsa pada abad XXI, masalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) menjadi faktor yang sangat penting.

c) IPM harus diarahkan untuk menghasilkan manusia dengan tingkat daya saing yang tinggi; yakni manusia yang cerdas, ulet, dan tangguh seperti yang ditentukan oleh kriteria Tannas. Untuk itu, faktor yang perlu mendapatkan perhatian adalah faktor yang berkaitan

dengan kesehatan masyarakat, seperti harapan hidup (*life expectancy*), jaminan kesehatan (*healthcare coverage index*), jumlah dokter perpenduduk, dan sebagainya. Juga tidak bisa diabaikan dalam menentukan IPM adalah seberapa besar akses manusia terhadap bidang pendidikan, ilmu dan teknologi serta informasi, termasuk sikap (*aptitude and attitude*) dan akses terhadap perpustakaan, internet, media elektronik, dan media lainnya.

- d) Sebagai jalan terwujudnya keadilan sosial, peran UMKM saat ini sebagai sebuah cita-cita untuk mewujudkan keadilan sosial tersebut. Terkait dengan sila kelima pada Pancasila bahwa keadilan sosial belum terwujud menjadi sebuah kenyataan yang nyata, kenyataan tersebut terlihat dari demokrasi ekonomi yang jalan ditempat sebagai wujud dari pengamalan pasal 33 UUD 1945 ayat 1 yaitu Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Oleh sebab itu secara ideologi peran UMKM dalam masyarakat sangat vital untuk membangun ketahanan ekonomi rakyat.
- e) Jaminan keamanan baik secara kondisional maupun secara pendanaan yang memberikan dukungan modal bagi para pelaku usaha UMKM, sangat dibutuhkan oleh para pengusaha. Dengan adanya jaminan pertahanan secara modal akan meberikan kelancaran produksi UMKM tersebut.



BAB III

PEMBAHASAN

11) Umum

Secara global, regional maupun nasional dipengaruhi oleh merebaknya isu global saat ini seperti demokrasi, HAM, lingkungan hidup, teroris internasional, senjata pemusnah masal hingga saat ini yang sedang terjadi yaitu Pandemi Global Covid-19. Isu-isu tersebut menjadi sebuah acuan banyak negara saat ini untuk dapat melakukan hubungan secara internasional antar negara, yang dalam implementasinya sering dimanfaatkan oleh negara maju sebagai instrument penekan untuk mendukung kepentingan politiknya baik dalam “aspek geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun aspek pertahanan keamanan.”

12) Optimalisasi UMKM untuk Pemulihan Ekonomi

Untuk dapat menjaga keberlangsungan kehidupan para pelaku UMKM dalam menghadapi situasi pandemic Covid 19, Pemerintah harus menjaga peluang yang menjadi tantangan tersendiri. Solusi yang tepat dari pemerintah dalam jangka pendek guna meningkatkan gairah pelaku UMKM tersebut serta para karyawan yang tergabung didalamnya. Sedangkan, dalam era industri 4.0 ini untuk tetap menjaga peluang UMKM bertahan perlu dilakukan secara berkesinambungan, artinya jalan keluar yang ditawarkan oleh pemerintah dalam jangka pendek dan jangka panjang perlu adanya dukungan fasilitas yaitu terdapat digitalisasi teknologi sebagai pendukung seluruh proses pelaksanaannya.

Dalam menjaga kelangsungan hidupnya memerlukan beberapa jalankeluar dalam kurun waktu jangka pendek. Pertimbangan lain dalam menjaga eksistensi UMKM yang dijabarkan oleh OECD, yaitu sebagai berikut: (1) perketat program protocol Kesehatan guna menunjang seluruh kegiatan ekonomi UMKM; (2) guna menjaga Kesehatan keuangan UMKM maka perlu adanya pertimbangan penundaan pembayaran utang; (3) secara struktural perlu adanya kebijakan bantuan *financial* bagi pelaku UMKM.

Pertama, dalam melaksanakan kegiatannya UMKM perlu diberikan izin pemberlakuan protokol kesehatan secara ketat. Hal tersebut dapat terlaksana dengan baik karena hubungan kerjasama pengusaha UMKM Lembaga atau pihak berwenang.

Kedua, pertimbangan untuk tetap menjaga keuangan UMKM, maka pemerintah perlu mempertimbangkan penundaan pembayaran hutang atau cicilan hutang bagi pelaku UMKM tersebut dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Pemberlakuan tersebut juga dapat melakukan pinjaman ditengah situasi yang dianggap darurat dengan lebih sederhana lagi. Sehingga dengan semua terjaga para pengusaha UMKM dan pekerjanya dapat meningkatkan daya beli yang sekaligus mendorong berjalan Kembali roda perekonomian nasional.

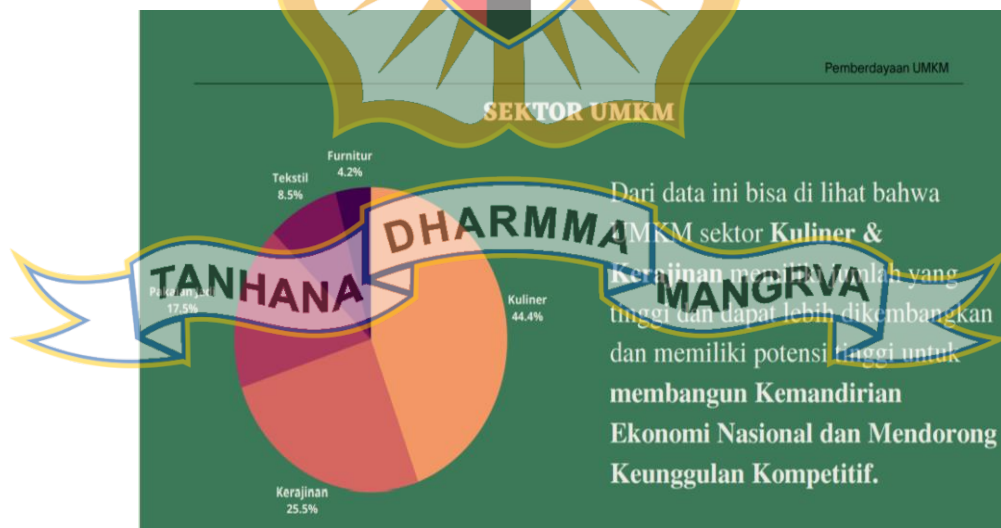
Ketiga, perlu adanya dukungan kepada pengusaha UMKM. Dengan jalur APBN 2020 untuk meminimalisasi dampak pandemic covid19, sebesar 70.1 triliun rupiah pemerintah telah menyalurkan pembiayaan sebagai insentif stimulus pajak serta stimulus KUR dengan pembiayaan sebesar 405.1 triliun rupiah. Kelancaran penggunaan anggaran tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dengan tepat, jelas serta transparan dan yang terpenting kelangsungan hidup UMKM dapat beraktivitas kembali dengan baik.

Suku Bunga lunak perlu digelontorkan kepada pelaku UMKM selain anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah, hal tersebut dapat menjadi sinyal dukungan pemerintah terhadap UMKM serta dilaksanakan oleh pihak perbankan baik yang dimiliki oleh pemerintah ataupun swasta dengan mekanisme dan tepat dan ketat kepada siapa pinjaman ini akan diberikan. Mekanisme yang tepat dan ketat pada pinjaman ini dimaksudkan agar setelah pembiayaan kredit atau pinjaman turun tidak disalahgunakan oleh para pelaku UMKM sehingga dapat membuat kerugian pihak Bank. Namun, dilihat dari sisi lain bahwa rancangan bantuan yang strategis diterima pelaku UMKM harus berhubungan langsung dengan wadah yang menaungi dalam skala nasional yakni KemenKopUKM dan Kemenperin.

Dalam rangka menjaga roda kehidupan UMKM stimulus telah dicanangkan pihak KemKopUKM yang setidaknya telah memberikan tiga

program yaitu: (1); memberikan keleluasaan pada pembayaran pinjaman, (2); dalam enam bulan kedepan pajak bagi pelaku UMKM diperingan; dan (3); trbagi skala mikro diberlakukan transfer secara tunai. Bagi Kemperin direncanakan akan melakukan; (1) bagi UKM akan diberikan Bunga yang rendah untuk pinjaman pelaku UMKM; (2) membuat jaringan bagi pengusaha UMKM dengan pemilik toko online sebagai wujud dukungan pemasaran dan penjualan hasil produksi UMKM; (3) sebagai wujud dukungan ketersediaan bahan baku maka pemerintah melakukan kerjasama dengan industri dalam negeri.

Bentuk lain yang dapat dilaksanakan agar dapat UMKM bertahan dalam pemulihan pandemic Covid19. Pemanfaatan TJSL yang diselenggarakan oleh pihak non pemerintahan atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Besanya dampak pandemic covid 19 bagi pelaku UMKM tersebut perlu didukung dengan danya instruksi dari pemerintah sebagai pedoman untuk pelaksanaan TJSL yang dapat menyentuh langsung UMKM. Secara khusus model dan jenis pemberdayaan yang dapat dilakukan pemerintah kepada UMKM tidak berbeda jauh antara masa sebelum maupun setelah pandemi Covid-19.



Gambar 4. Sektor UMKM

Guna menjaga aktivitas dan keberlangsungan UMKM pada masa pendemi sekarang ini Kementerian Kopresi, Usaha Kecil dan Menengah telah membuka tiga stimulus yaitu: 1) Pinjaman yang dilongkarkan; 2) pajak

yang ringan dalam jangka waktu enam bulan; 3) pada skala mikro dilakukan transfer tunai. Dilain pihak Kemenperin berencana melakukan: 1) UKM diberikan kemudahan (lebih rendah dari tingkat suku Bunga); membuka konektivitas dengan pelaku atau took yang memiliki teknologi dalam jaringan, guna memudahkan pemasaran; 3) membuka peluang kerjasama kepihak lain 4) melakukan proses negosiasi untuk melanjutkan aktivitas ekspor sehingga perlu adanya kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan Atase Industri. Kebijakan tersebut bukan hanya dilakukan pada saat menghadapi pandemic Covid-19 saja, namun dalam jangka panjang untuk menghadapi era digitalisasi.

a. Optimalisasi UMKM melalui aspek kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses)

- (1) Pembinaan bagi para pelaku UMKM secara berkala dan rutin serta pembelajaran kepada para UMKM agar usaha dengan benar bahwa Pemerintah bukanlah pihak yang berkuasa diatas, melainkan pihak yang bersama sama dengan masyarakat bergerak keatas.
- (2) integrasi digitalisasishingga meberikan stimulus terdorongnya UMKM digital yang dapat meningkatkan optimalisasi potensi dan produktivitas.
- (3) Dapat menjadi inisiatif Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia, dengan jalur Himbara yaitu Himpunan Bank Milik Negara dengan peluang e-commerce seperti pelatihan, promosi serta pendistribusian bantuan pinjaman.
- (4) Memberikan inisiatif pelaksanaan pengembangan usaha infrastruktur fisik dan digital, dimana sebuah jaringan fiber optic seperti Palapa Ring, Menara BTS serat jaringan Internet.

b. Optimalisasi faktor eksternal dengan menggunakan pisau analisis PEST, yaitu Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi

1) Kebijakan politik

LKPP sudah memfasilitasi kemudahan UMKM untuk menjadi salah satu penyedia dalam E-Katalog dan ada kebijakan yang di kawal BPKP untuk penggunaan P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam

Negeri).

2) Kebijakan Ekonomi

Salah satu wujud dukungan pemerintah yaitu dengan ketersediaannya Program Pemulihan Ekonomi Nasional bagi UMKM, berupaya menyediakan sejumlah stimulus melalui kebijakan restrukturisasi pinjaman, tambahan bantuan modal, keringanan pembayaran tagihan listrik, dan dukungan pembiayaan lainnya.

3) Kebijakan Sosial

Masih banyak pada posisi di ruang lingkup non formal sehingga perlu adanya dukungan untuk berubah berada pada ruang lingkup yang resmi. Kerumitan dengan masalah izin usaha masih sering terjadi di Indonesia, hal tersebut muncul karena adanya aturan yang lebih dan tumpang tindih antara di daerah dan pusat yang terlihat disharmoni, kurang operasional, dan sektoral. Harga yang lebih kompetitif karena sumber bahan baku yang lebih mudah di dapat di dalam negeri.

4) Kebijakan Teknologi

Adalah melalui Undang-Undang Cipta Kerja serta dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, merupakan usaha pemerintah dan UMKM untuk go-digital, go-legal. Membuka peluang pasar baru dapat memberikan kesempatan bagi UMKM untuk dapat bertahan di era digitalisasi.

5) Pembangunan Aplikasi UMKM

Salah satu dukungan datang melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Kamar Dagang Indonesia yang telah memfasilitasi UMKM lewat aplikasi di Play Store bernama UMKM-Mu. Dengan adanya aplikasi tersebut serta dapat di unduh oleh seluruh masyarakat maka memperlihatkan bahwa OJK dan Kadin memiliki kepedulian bagi berkembangnya UKM Milenial yang melakukan kegiatan di seluruh wilayah Indonesia :

a. Perlindungan UMKM

Pelindungan terhadap UMKM terutama dilakukan melalui kemudahan dan kepastian perijinan. Dengan demikian maka UMKM terdaftar secara resmi dan dilindungi secara hukum.

b. Pembiayaan UMKM

Besarnya para pelaku UMKM yang memanfaatkan fasilitas pemberi hutang illegal menjadi catatan khusus bagi Presiden Jokowi, oleh sebab itu segala bentuk dorongan serta pendukung bagi UMKM untuk dapat menikmati fasilitas perbankan perlu dikedepankan, tercatat hanya 12 persen dari pelaku UMKM yang memanfaatkan fasilitas perbankan tersebut. Pada sebuah koperasi Di Provinsi Bali mulai mencoba Aplikasi *Sharing Economy* sudah berjalan. Dengan berbasis android tercatat sebanyak sebelas koperasi yang ada di Bali telah terkoneksi pada KSP TEB Artha Mulia (*interconnected*). Adapun hasil yang didapat dari program tersebut adalah meningkatnya Anggota dan asset yang dimiliki oleh koperasi tersebut. Selain itu Kemkop UKM juga menawarkan sebuah Layanan Konsultasi Hukum, Hukum online Group yang bekerjasama dengan Kemkop UKM sebagai jasa penyedia layanan konsultasi hukum secara gratis untuk para pelaku UMKM secara khusus bagi para pelaku UMKM yang terkena imbas pandemic covid19. Untuk mendukung profesionalitas dalam pengelolaan dan pengembangan UMKM, pemerintah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

Untuk mendukung profesionalitas dalam pengelolaan dan pengembangan UMKM, Pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa untuk melakukan sebagai berikut:

1) UMKM Eksportir

Pada tahun 2030 nanti diharapkan Program Kolaborasi Akselerasi dapat memperlihatkan 500ribu Eksportir baru. Program tersebut disambut dengan baik oleh para pelaku UMKM di bidang seperti produk pertanian, perikanan, *furniture*, desain interior, *home décor*, produk herbal, fashion dan lain sebagainya. Pengembangan tersebut tentunya tidak lepas dari peningkatan dari segala bidang terutama peningkatan sumber daya manusia (SDA) yang perlu mengadopsi teknologi pemasaran dan sektor keuangan. Pendekatan terhadap RCIP dan CEPA instens dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Dengan adanya kerjasama tersebut

diharapkan dapat meningkatkan dan mempercepat tujuan bersama.

2) Akuntansi dan Laporan Keuangan UMKM

Faktor utama keuangan dalam posisi sehat terlihat dengan adanya pencatatan akuntansi secara sederhana dan laporan keuangan yang “sehat”. Sementara di lain sisi dapat dilihat dari Nur Fadhila Amri SE., M. Si pada tahun 2008 menjaikan sebuah makalah dengan judul “*Accounting for UMKM*” yang telah menjelaskan bahwa: Masih rendah dan lemahnya praktik akuntansi secara khusus pada akuntansi keuangan sektor UMKM di Indonesia (Wahdini & Suhairi, 2006). Sebagai dasar penghitungan pajak biasanya perusahaan yang berskala kecil lebih condong melakukan norma perhitungan atau tanpa Menyusun laporan keuangan, hal ini dilakukan dengan pertimbangan *cost* untuk membayar pajak lebih kecil dari pada membuat laporan keuangan (Sudarini dalam Wahdini & Suhairi, 2006).

Wahdini dan Suhairi (2006) juga memperlihatkan bahwa pemahaman tentang penerapan SAK dapat memberikan sebuah bukti yang dapat menjadi standar dalam Menyusun LK yang memberatkan para pelaku UMKM, tidak dapat dipungkiri bahwa akuntansi dan LK yang baik, menjadi persyaratan untuk mendapatkan kredit di bank. Dengan adanya akuntansi dan laporan keuangan yang baik pihak perbankan dapat melihat posisi keuangan UMKM dengan baik serta manfaat lainnya. (Warsono, 2010).

3) Block Chain sebagai Bangunan pada UMKM

Block Chain atau dapat dikenal sebagai Pembangunan Ekonomi Jaringan yang ditujukan pada kawanan Milenial Economics. Dengan pengembangan teknologi *block chain* diharapkan bahwa UMKM dapat membangun sebuah profil bisnis berbasis digital. UMKM berbasis digital salah satunya untuk adalah dengan memperlihatkan profil bisnis digitalisasi dan *credit scoring*. Oleh sebab itu para pelaku UMKM memerlukan sebuah jembatan menuju UMKM Digitalisasi agar dapat mendekatkan diri pada instansi keuangan, perbankan, serta para pemasok bahan baku lainnya

dengan mengedepankan teknologi *block chain*. Ketergantungan UMKM pada *network economy* atau ekonomi jaringan serta perbankan kredit secara khusus pada UMKM, konektivitas pada pemasok bahan baku merupakan sebuah rangkaian perekonomian UMKM. Dalam beberapa tahun kedepan bahwa sebuah kelompok usaha mengedepankan *supply chain* guna menjawab sebuah tantangan pada dunia maya atau *virtual network*.



Gambar 5. Pelaku UMKM

Majunya perekonomian Indonesia diperankan oleh UMKM sebagai ujung tombak perekonomian. Pada saat banyak perusahaan mengalami kesulitan perkembangan usaha yang diakibatkan oleh krisis moneter pada tahun 1997, UMKM sebagai salah satu jala keluar yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru hadir untuk mengatasi masalah tersebut. Hingga sampai sekarang UMKM memberikan kontribusi yang besar dalam pendapatan negara maupun daerah di Indonesia. Pada setiap tahunnya PDB terus meningkat imbas dari bergeraknya roda ekonomi pada sektor UMKM. Namun, keadaan UMKM tetap dianggap kritis seiring dengan rendahnya dukungan dari sektor perbankan, pasar bebas yang mulai aktif dibuka, serta kebijakan terhadap usaha kecil sangat terbatas. Oleh sebab itu, guna mengatasi permasalahan yang kerap hadir pemerintah perlu bersinergi kepada seluruh elemen baik industri

kecil maupun besar guna memperkuat struktur ekonomi baik nasional maupun daerah.

Permasalahan seperti urbanisasi, kemiskinan, pembangunan yang kurang merata baik dipedesaan maupun diperkotaan serta masih tingginya angka kemiskinan menjadi sebuah masalah social dan ekonomi bagi negara berkembang seperti Indonesia terutama dalam mengembangkan UMKM. Oleh sebab itu, perlu adanya langkah-langkah nyata dalam penanggulangan masalah tersebut diatas yang dimotori oleh kontribusi Pemerintah.

Saat ini perlu mengedepankan daya saing yang tinggi dalam menyikapi faktor apa saja yang mempengaruhi UMKM agar tetap eksis dan bersaing dikancah nasional maupun global. Ketatnya persiapan usaha dikancah nasional maupun global ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, kualitas produk, harga produk serta desain produk serat lingkungan yang ada.

13) Relaksasi Ekonomi Yang Dilakukan Pemerintah terhadap UMKM

a. Kebijakan Pemerintah Relaksasi Terhadap UMKM

Guna mendalami situasi pandemi akibat Covid19, pemerintah telah membuat berbagai kebijakan r elaksasi terhadap UMKM. Kebijakan ini telah mampu mendukung UMKM agar tidak semakin terpuruk. Adapun kebijakan relaksasi terhadap UMKM antara lain.

Pertama, subsidi bunga kredit merupakan desain pendukung yang dilakukan kepada UMKM. Penulis berpandangan bahwa teknis telah dirancang secara optimal dalam membantu UMKM ditetapkan sebagai pemberian bantuan tersebut dilakukan dengan tertib dan bantuan diberikan kepada pihak-pihak yang tepat serta tidak salah sasaran.

Kedua, terkait sasaran program PEN berupa subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, kebijakan tersebut disusun pemerintah dengan jumlah anggaran yang besar dengan maksud sebagai wujud keberpihakan anggaran negara kepada UMKM sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi utama.

Ketiga, terkait kebijakan pemerintah berupa subsidi bunga diberikan

untuk memperkuat modal UMKM, kebijakan ini sebetulnya telah dilakukan atau melanjutkan kebijakan terdahulu yang telah dilaksanakan sebelumnya. Optimalisasi dan pengawasan, serta peningkatan kapasitas lembaga pemerintah terkait hal tersebut merupakan kunci dari keberhasilan kebijakan ini.

Keempat, mengenai kebijakan pemerintah untuk memposisikan pembiayaan pada perusahaan bank nasional dengan restrukturisasi perkreditan usaha mikro kecil dan menengah yaitu berupa alokasi pendanaan, kebijakan ini sangat penting dalam menjamin keberlangsungan kegiatan UMKM dalam hal modal usaha. Sekali lagi pengawasan dan kesiapan lembaga serta sumber daya manusia perlu benar-benar diperhatikan guna keberhasilan kebijakan ini.

b. Tinjauan Relaksasi UMKM Menurut Tinjauan Politik

Efektifitas kebijakan yang dibuat negara sangat ditentukan oleh aspek politik, yang mana kebijakan negara itu sendiri merupakan produk dari sebuah sistem politik. Konteks politik negara Indonesia masih kondusif selama pandemi Covid 19. Kebijakan relaksasi kepada UMKM mulai dari perancangan sampai dengan evaluasi kebijakan, pemerintah mendapat dukungan yang cukup kuat secara politik.

Selain dilihat bahwa partai politik pendukung pemerintah yang mayoritas menguasai lembaga legislatif, komunikasi dan koordinasi yang baik juga terlihat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara dalam perspektif *check and balances*.

Program relaksasi UMKM mendapat dukungan yang optimal. Lembaga pengawasan keuangan negara dan aparat penegak hukum juga berkontribusi dalam mengawal agar kebijakan dan anggaran yang digelontorkan dapat tetap sasaran kepada pihak-pihak yang dituju sehingga dapat memberikan hasil dan dampak yang optimal terhadap pemulihan ekonomi nasional yang diharapkan.

c. Relaksasi Kebijakan Dukungan Anggaran UMKM

Dalam membangun pondasi perekonomian Indonesia UMKM memiliki peran penting. Restrukturisasi pinjaman merupakan salah satu dukungan untuk dapat membuka stimulus, selain hal tersebut penambahan bantuan permodalan, tagihan pembayaran listrik dengan ringan, serta dukungan pembiayaan lainnya merupakan sebuah dukungan nyata pemerintah. Usaha Mikro Kecil dan Menengah memerlukan inovasi kearah produksi dengan kebutuhan pasar, solusi atau jalan keluar bagi adanya permasalahan sosial dan ekonomi yang diakibatkan karena Pandemi Covid-19, memerlukan pengembangan beberapa gagasan atau ide bagi para pelaku UMKM.

d. Perspektif Dukungan Sosial Budaya Kebijakan Pemerintah Terkait Relaksasi UMKM

Program relaksasi UMKM mendapat dukungan sosial budaya. Menurut penulis masyarakat telah merasakan manfaat dari program relaksasi tersebut sehingga secara sosial dan budaya kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

e. Metode Yang Digunakan Dalam Relaksasi UMKM

Sama dengan Pemulihan Ekonomi Nasional, metode yang digunakan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional secara umum menggunakan metode yang relatif sama dengan program-program ekonomi sebelumnya.

Kebijakan teknis yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga sebagian besar masih mengandalkan sumber daya yang ada di pemerintahan, selain melibatkan lembaga keuangan. Beberapa kendala sering menjadi kendala yakni antara lain: Pertama, kurangnya sosialisasi kebijakan. Kebijakan yang belum dipahami masyarakat akan berpotensi menimbulkan kebingungan yang pada akhirnya bermuara pada tidak optimalnya program tersebut. Kedua, mekanisme yang cenderung panjang dan berbelit-belit. Ketiga, sumber daya manusia dan teknologi yang masih belum siap. Keempat, lemahnya pengawasan dan evaluasi atas keberhasilan kebijakan/program tersebut.

Dalam hal inilah penulis menaruh konsern agar pemerintah dapat

memperbaiki berbagai kelemahan tersebut sehingga anggaran relaksasi kepada UMKM memberikan manfaat dan dampak yang besar.

f. Strategi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dengan melihat keadaan UMKM untuk dapat bertahan dengan melihat kondisi UMKM saat ini, kondisi UMKM dapat dianalisis dengan pendekatan SWOT yaitu: (1) *Strengths* (kekuatan), (2) *Weaknesses* (kelemahan), (3) *Opportunities* (peluang) dan (4) *Threats* (Ancaman) yang sering dihadapi oleh UMKM yang meliputi dua Faktor Internal terdiri dari *Strength* (Kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan), sedangkan Faktor Internal terdiri dari *Opportunity* (Kesempatan/Peluang) dan *Threats* (Ancaman).

Faktor internal ini adalah segala hal yang datang langsung dari dalam UMKM, bukan dari luar, yaitu sebagai berikut:

a) **Strengths (kekuatan)**

Secara umum kekuatan para pelaku UMKM dalam melakukan usahanya yakni:

- (1) Konsep atau gaya yang kemukakan merujuk pada konsep modern.
- (2) Penentuan lokasi yang mudah dijangkau merupakan salah satu rujukan untuk menentukan tingkat berprestasinya suatu usaha, tidak terkecuali dengan usaha dengan skala UMKM. Pemilihan lokasi yang strategis menjadikan salah satu penentu keberhasilan perkembangan UMKM. Hal ini tentu sangat mendukung perkembangan UMKM.
- (3) Persaingan harga dipandang oleh pembeli yang umumnya lebih mengedepankan lokasi mereka dapat mendapatkan harga dengan kompetitif, serta mendapatkan perbandingan harga yang lebih rendah namun tanpa mengurangi kualitas sebuah produk.
- (4) Dalam sebuah bisnis modal yang penting dimiliki perusahaan adalah keramahan karyawan serta perilaku yang baik dalam melayani konsumen. Dimana, secara langsung karyawan akan berinteraksi secara langsung kepada pelanggan atau konsumen sehingga membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik. Dengan adanya interaksi yang baik dapat menumbuhkan atau meningkatkan pesanan

produk atau order pada produk UMKM karena konsumen merasa yakin dengan yang dijelaskan oleh karyawan tersebut. Metode UMKM agar dapat merangsang pelanggan untuk bertransaksi pembelian.

(5) Produk yang berkualitas disinyalir menjadi sebuah kekuatan dalam mengembangkan strategi UMKM, hal tersebut ditopang dengan adanya karyawan yang profesional dan berkualitas.

(6) Pelayanan yang baik pada UMKM, upaya pelayanan ini dilakukan oleh UMKM terhadap konsumen atau pelanggan dengan penuh rasa tanggungjawab apabila nantinya produk yang dipesan mengalami kesalahan. Namun, apabila kesalahan terjadi pada pihak yang memesan, UMKM dapat memberikan jalan keluar yang baik.

(7) Dukungan digitalisasi berupa website serta komunikasi pribadi juga kontak delivery order.

(8) Penjualan barang dijamin sampai kepada pelanggan atau konsumen.

b) **Weaknesses (Kelemahan)**

Weaknesses atau kelemahan dapat dipandang sebagai hal penghambat yang dihadapi UMKM dalam perkembangan serta pelaksanaan aktivitas yang dapat berpengaruh atas tercapainya keuntungan yang ditargetkan pengusaha UMKM. Dapat dilihat contoh bahwa kelemahan yang dapat digambarkan yaitu :

(1) Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan memperhatikan bahwa dipergunakan adalah modal sendiri serta para pelaku UMKM merasakan kesulitan dan membutuhkan waktu yang lama dalam prosesnya apabila menginginkan jasa pengajuan kredit baik pada perbankan maupun Lembaga keuangan lainnya.

(2) Pencatatan dan pembukuan yang dilakukan oleh manajemen masih bekerja kurang optimal. Hal tersebut belum rapihnya pencatatan dan pembukuan tersebut yang dilakukan oleh pelaku UMKM.

(3) Alat produksi yang belum terawat dengan baik. Hal tersebut karena pelaku UMKM belum memiliki karyawan khusus yang menangani perawatan alat produksi.

(4) Minimnya barang siap (*ready stock*) sehingga konsumen harus menunggu ketersediaan barang.

(5) Belum adanya produk yang benar-benar menjadi unggulan.

Beberapa faktor luar terdapat dua elemen yaitu menjadi *Opportunity* (kesempatan) maupun *Threats* (Ancaman)

a) **Opportunities (Peluang)**

Tumbuh dan berkembang merupakan sebuah kondisi yang mendukung atau memberikan peluang kepada UMKM. Adapun peluang tersebut adalah:

- (1) Untuk dapat tetap memberikan layanan serta eksistensi yang baik, perlu adanya kesempatan bagi UMKM memperluas jaringan pasar serta perkembangan perekonomian UMKM, social, budaya pada masyarakat.
- (2) Memperluas tempat usaha dengan banyaknya peminat produk membuat UMKM dapat potensi tersebut sebagai peluang pengembangan dan perluasan jaringan UMKM.
- (3) Produk yang selalu berkembang dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap desain yang semakin bervariasi.
- (4) Target market yang sesuai dengan adanya dukungan dari para influencer, membantu terdorongnya pemasaran UMKM dengan cepat. Adanya sebuah program organisasi satu berbagi untuk semua

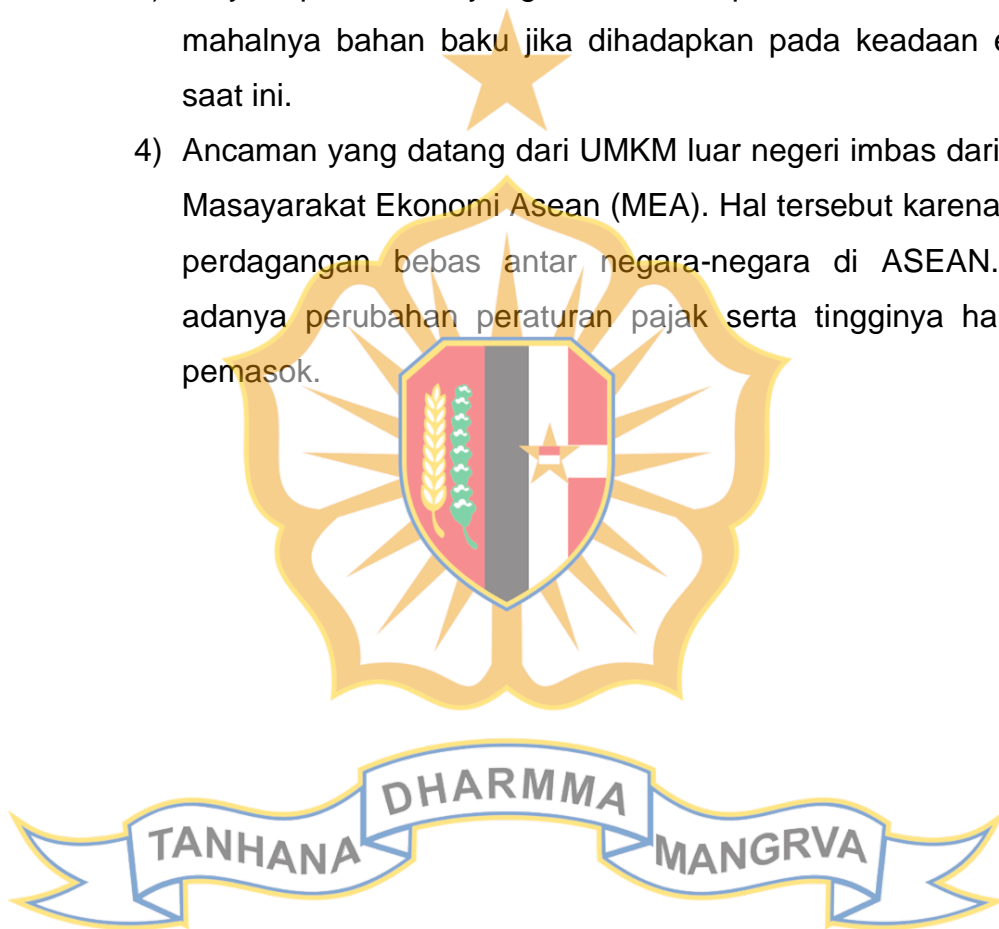
b) **Threats (Ancaman)**

Masyarakat yang berkembang secara ekonomi, sosial, teknologi dan budaya, menjadi sebuah kendala bahkan hambatan tersendiri bagi para pelaku UMKM. Telah teridentifikasi beberapa ancaman yang dapat menghambat berkembangnya UMKM, yaitu sebagai berikut:

- 1) UMKM dapat diancam melalui kemajuan digitalisasi yang berkembang saat ini. Permasalahan tersebut dipandang karena, semakin mudahnya masyarakat untuk dapat akses teknologi melalui *Handphone*. Dimana HP tersebut memiliki fitur seperti Email, BBM, WA, FB serta lain sebagainya. Dengan adanya

fasilitas tersebut memudahkan interaksi antar individu, hal tersebut diprediksi akan mengurangi jumlah pekerja pada UMKM.

- 2) UMKM juga harus memandang pelaku usaha baru sebagai sebuah ancaman. Hal tersebut apabila pelaku usaha baru dapat melakukan pelayanan yang lebih baik, seperti komunikasi yang lebih ramah, keunggulan produk yang baik, keringanan harga, oleh sebab itu dapat memberikan ancaman bagi UMKM.
- 3) Biaya operasional yang keluar cukup besar, diakibatkan dari mahalnya bahan baku jika dihadapkan pada keadaan ekonomi saat ini.
- 4) Ancaman yang datang dari UMKM luar negeri imbas dari adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Hal tersebut karena adanya perdagangan bebas antar negara-negara di ASEAN. Sering adanya perubahan peraturan pajak serta tingginya harga dari pemasok.



<div>Internal</div> <div>Eksternal</div>	Strengths (S) <div><div>(1) Update trendy terkini</div><div>(2) Keterjangkauan lokasi</div><div>(3) Persiapan harga yang sehat</div><div>(4) Keramahan karyawan</div><div>(5) Produk yang dihasilkan berkualitas</div><div>(6) Fleksibilitas layanan pada UMKM</div><div>(7) Memiliki website dan forum pribadi</div><div>(8) Keterjaminan dalam penyampaian barang yang dijual</div></div>	Weaknesses (W) <div><div>(1) Modal UMKM</div><div>(2) Manajemen kurang optimal.</div><div>(3) Perawatan Alat Produksi.</div><div>(4) Kurangnya stok barang (ready stock)</div><div>(5) <i>Brand</i> unggulan belum tercipta</div></div>
	Threat (T) <div><div>(1) Luasnya Pangsa Pasar</div><div>(2) Memperluas tempat usaha</div><div>(3) Produk yang selalu berkembang</div><div>(4) Sosial media</div><div>(5) forum untuk saling berbagi satu sama lainnya</div></div>	Strategi ST <div><div>Rutinitas yang efektif untuk mendampingi pelaku UMKM</div><div>Mengoptimalkan potensi dan produktivitas UMKM</div></div>
Opportunity (O) <div><div>(1) Perkembangan Teknologi.</div><div>(2) Pesaing baru</div><div>(3) Mahalnya bahan baku</div><div>(4) Adanya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)</div><div>(5) Harga dari supplier yang semakin mahal dan peraturan pajak yang berubah dari pemerintah</div></div>	Strategi WO <div><div>- Dengan program <i>Perubahan Ekonomi Nasional</i> membuktikan bahwa dukungan nyata dari Pemerintah</div><div>- Melalui upaya UMKM go-legal melalui UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya PP No 7 tahun 2021</div></div>	

Tabel Analisis SWOT

14) Kontribusi UMKM Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19

Ada banyak kajian yang memperlihatkan penjelasan tentang pandemic covid 19 mempengaruhi kenyataan yang negative bagi roda ekonomi dalam negeri yaitu misalnya menurunnya daya beli konsumen serta penurunan pada barang-barang konsumsi, kinerja perusahaan yang menurun, potensi ancaman bagi sektor perbankan serta keuangan, dan perilaku keberadaan UMKM saat pandemi ini menimbulkan banyak berkurangnya para pekerja atau bahkan kehilangan pemasukan setiap bulan oleh sebab itu dapat berpengaruh pada kekuatan beli masyarakat serta pada tatanan konsumsi secara khusus bagi masyarakat pada kelompok yang memiliki pekerjaan lepas atau tidak menentu. Dalam hal pengeluaran mereka membiasakan untuk lebih selektif karena belum adanya titik terang akan berakhirnya pandemi ini. Kenyataan tersebut membuat menurunnya kekuatan konsumen untuk membeli kebutuhan pokok.

1. Kebijakan Pemerintah Melalui Program PEN

Dalam menghadapi situasi akibat Covid 19, pemerintah telah membuat berbagai kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Penanggulangan Kesehatan ekonomi yang dilakukan pemerintah melalui program PEN perlu terus digencarkan dan digalakkan agar mampu menyelamatkan perekonomian Indonesia. Beberapa kebijakan pemerintah terkait PEN terhadap UMKM harus disikapi lebih lanjut, yakni sebagai berikut.

Pertama, subsidi bunga kredit sebagai bentuk dukungan pada UMKM. Guna mendukung terlaksananya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin. Dengan nilai permodalan sampai dengan Rp. 10 milyar dapat digelontorkan kepada pelaku UMKM yang telah dipayungi oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.05/2020 telah dirancang begitu optimal dalam membantu

UMKM dalam menghadapi kondisi ekonomi akibat Covid 19. Kriteria penerima pemberian tersebut yaitu diberikan kepada Baki Debet Kredit atau Pembiayaan bagi mereka yang sampai dengan tanggal 29 Februari 2020, tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional, performing loan lancar menjadi salah satu kategori yang harus dipenuhi kolektabilitas 1 maupun 2 terhitung sejak 29 Februari 2020, serta syarat yang harus ada yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau mendaftar untuk mendapatkan NPWP telah ditetapkan bertujuan untuk dilaksakan pemberian bantuan tersebut dilaksanakan secara tertib dan bantuan diberikan kepada pihak-pihak yang tepat serta tidak salah sasaran.

Kedua, terkait sasaran program PEN yang telah digelontorkan sebnayak Rp. 123,46 triliun dalam bentuk bunga pinjaman bersubsidi, kredit yang telah direstrukturisasi, kebijakan tersebut disusun pemerintah dengan jumlah anggaran yang besar dengan maksud sebagai wujud keberpihakan anggaran negara kepada UMKM sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi utama.

Ketiga, terkait kebijakan pemerintah berupa bunga yang bersubsidi digelontorkan dengan tujuan sebagai pondasi kekuatan pembiayaan UMKM melalui jalur perbankan lewat program KUR (Kredit Usaha Rakyat), serta Lembaga keuangan non Bank menyalurkan kredit Ultra Mikro/UM dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LBDP) yang telah menyalurkan dana bergulir, Kementerian KUKM, kebijakan ini sebetulnya telah dilakukan atau melanjutkan kebijakan terdahulu yang telah dilaksanakan sebelumnya. Optimalisasi dan pengawasan, serta peningkatan kapasitas lembaga pemerintah terkait hal tersebut merupakan kunci dari keberhasilan kebijakan ini.

Keempat, mengenai kebijakan didalam negeri sendiri melalui Pemerintah siap menggelontorkan pembiayaan di perbankan nasional dengan besaran Rp. 78,78 triliun dengan tujuan restrukturisasi kredit UMKM, PT. (Persero) Jamkrindo dan Askrindo sebagai perusahaan yang ditunjuk Pemerintah untuk melakukan permodalan kerja UMKM hingga Rp.10miliar guna meningkatkan likuiditas UMKM dalam berusaha, kebijakan ini sangat penting dalam menjamin keberlangsungan kegiatan

UMKM dalam hal modal usaha. Sekali lagi pengawasan dan kesiapan lembaga serta sumber daya manusia perlu benar-benar diperhatikan guna keberhasilan kebijakan ini.

Kelima, dalam hal kebijakan pemerintah untuk dapat menanggung insentif Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21) sehingga dapat mengurangi beban karyawan UMKM. Sementara itu insentif pajak penghasilan yang bersifat final 0,5% untuk pengusaha UMKM Pemerintah mengakomodir hal tersebut. Insentif Pajak Penghasilan 22 impor (PPH 22 Impor) juga diberikan kepada WP UMKM. Regulasi ini berkorelasi dengan potensi pendapatan negara melalui pajak akan terkoreksi, dalam situasi perekonomian negara yang luar biasa akibat Covid 19, pemerintah telah mengambil langkah dan prioritas dalam menyelamatkan ekonomi masyarakat terlebih dahulu, yang mana perlindungan negara kepada masyarakatnya adalah tujuan hakiki dari hadirnya negara.

2. Tinjauan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dari Aspek Politik

Program pemulihan ekonomi nasional berikut berbagai peraturan teknisnya sebagai instrumen fiskal negara telah disusun dan dibahas bersama lembaga legislatif dalam waktu yang relatif singkat serta mendapat dukungan yang optimal. Lembaga pengawasan keuangan negara dan aparat penegak hukum juga berkontribusi dalam mengawal agar kebijakan dan anggaran yang digelontorkan dapat tetap sasaran kepada pihak-pihak yang dituju sehingga dapat memberikan hasil dan dampak yang optimal terhadap pemulihan ekonomi nasional yang diharapkan. Keamanan nasional juga tetap terjaga oleh aparat keamanan, yang mana terlihat bahwa gejolak yang terjadi di masyarakat maupun dari organisasi-organisasi yang terlarang tetap dapat dikendalikan dengan optimal. Hal ini secara keseluruhan dapat dilihat dari angka berbagai survei yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam menyelesaikan berbagai masalah selama pandemi masih cukup tinggi.

3. Dukungan Anggaran (Ekonomi) Dari Kebijakan Tersebut

Dukungan anggaran negara sekali merupakan wujud dari keberpihakan negara kepada kebutuhan utama masyarakatnya. Pemerintah dapat menggunakan instrumen fiskal dalam menyelamatkan ekonomi masyarakat secara umum, yang mana bahkan di masa pandemi ini, instrumen fiskal adalah senjata utama yang dimiliki oleh negara, dimana berbagai aspek ekonomi lainnya terdampak dan mengalami kesulitan untuk bertumbuh seperti saat kondisi ekonomi normal.

Kebijakan negara dalam aspek anggaran benar-benar telah diprioritaskan secara optimal bagi penyelamatan ekonomi dan perlindungan sosial dan jaminan pengobatan masyarakat yang terdampak Covid 19. Sebagai konsekuensinya, berbagai target indikator kinerja utama pemerintah akan terkoreksi. Tidak hanya itu, pemerintah juga telah melakukan berbagai penghematan dan rasionalisasi anggaran pada tatanan daerah maupun pusat. Pada intinya pemerintah telah secara serius dan melakukan berbagai langkah yang di luar kelaziman dalam rangka menjamin kemampuan masyarakatnya dalam menghadapi berbagai dampak dari pandemi Covid 19.

4. Program PEN Dilihat Dari Perspektif Dukungan Sosial Budaya Kebijakan Pemerintah

Dalam aspek dukungan sosial budaya terhadap kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dibuat pemangku kebijakan dalam menghadapi pandemi Covid19, boleh dikatakan bahwa secara umum masyarakat telah mendukung kebijakan dan program tersebut. Meskipun di awal-awal pandemi masih banyak kebijakan kesehatan yang belum begitu baik implementasinya yang terlihat belum sepenuhnya rumah sakit siap baik dari sisi fasilitas, sumber daya manusia, dan anggarannya, namun kondisi tersebut dapat diatasi dalam waktu yang relatif singkat. Manfaatkannya wisma atlet digunakan sebagai RSD Covid19 dan berbagai fasilitas negara lainnya juga dioptimalkan dalam menampung pasien Covid 19 yang dalam beberapa kali mencapai puncaknya, sekalipun di awal pandemi pemerintah terlihat belum

sepenuhnya siap, namun kondisi tersebut juga dapat teratasi dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi-kondisi tersebut tetap menjaga kepercayaan masyarakat secara sosial dan budaya dalam mendukung kebijakan dan program pemerintah.

Keberhasilan program PEN dan program lain dalam menghadapi Covid 19 juga ditentukan oleh dukungan organisasi masyarakat dan media (pers). Berbagai organisasi masyarakat di bidang agama, sosial, dan budaya juga ikut melakukan sosialisasi dan pembinaan kesadaran dan kepatuhan dalam menjalankan berbagai protokol kesehatan yang diminta oleh negara. Tidak hanya itu lembaga keagamaan dan sosia budaya ini juga terlaibat dalam penyebarluasan target pemerintah terkait target vaksinasi untuk dapat mencapai *herd community*.

Media juga mendukung berbagai sosialisasi dan internalisasi kebijakan pemerintah. Masyarakat juga semakin dicerdaskan dengan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik terhadap bahaya Covid 19. Media juga melakukan fungsi pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan program dan anggaran dalam mengatasi Covid 19 serta memulihkan ekonomi nasional.

5. Tata Cara Pemulihan Ekonomi Nasional

Tata cara dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasiona (PEN) secara umum menggunakan metode yang relatif sama dengan program-program ekonomi sebelumnya. Kebijakan teknis yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga sebagian besar masih mengandalkan sumber daya yang ada di pemerintahan, selain melibatkan lembaga keuangan semisal perbank dan lembaga keuangan lainnya. Aspek-aspek digunakan sering menjadi kendala berasal dari birokrasi itu sendiri. Beberapa kendala yang telah sering menjadi kendala yakni antara lain: Pertama, kurangnya sosialisasi kebijakan. Kebijakan yang belum dipahami masyarakat akan berpotensi menimbulkan kebingungan yang pada akhirnya bermuara pada tidak optimalnya program tersebut. Kedua, mekanisme yang cenderung panjang dan berbelit-belit. Ketiga, sumber daya manusia dan teknologi yang masih belum siap. Keempat, lemahnya pengawasan dan

evaluasi atas keberhasilan kebijakan/program tersebut. Dalam hal penting diingat agar pemerintah dapat memperbaiki berbagai kelemahan tersebut sehingga anggaran PEN yang begitu besar tidak menjadi sia-sia, namun benar-benar memberikan manfaat dan dampak yang sebesar-besarnya kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM. Kebijakan yang perlu diambil antara lain melalui:

Pertama, *trading house* yang terbentuk pada Smesco Indonesia maka akses UMK menjadi kuat.

Kedua, system permodalan pada UMKM perlu menggunakan ekatalog.

Ketiga, keramahan permodalan pada UMKM.

Keempat, inovasi bagi kegiatan produksi UMKM baik dari sisi produksi, distribusi, pembiayaan, hingga pemasaran.



Gambar 6. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018



Gambar 7. Kontribusi UMKM dalam Mensukseskan G20

BAB IV

PENUTUP

15) Kesimpulan

a) Rekomendasi

Pentingnya kontribusi UMKM dalam pemulihan ekonomi di Indonesia, seperti yang kita lihat bersama bahwa Pandemi Covid 19 belum usai, maka dibutuhkan peran atau kontribusi UMKM dalam memulihkan Kembali perekonomian bagi lingkungan terkecil yakni keluarga dalam menjaga ketahanan hidup roda rumah tangga dengan jalan berkontribusi kepada aspek yang dapat menambah ekonomi mereka. Relaksasi yang diberikan oleh pemerintah dalam menjaga kehidupan UMKM di Indonesia dengan memberikan Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) serta Kredit Usaha Rakyat, hal ini diharapkan dapat menjangkau keterbatasan pemodal yang dialami oleh para pelaku UMKM akibat dari merebaknya virus covid-19. Bantuan permodalan untuk UMKM dan kemudahan untuk mengakses modal dari perbankan sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu diharapkan peran nyata dari Pemerintah untuk memberikan permodalan pada UMKM berupa bantuan hibah untuk mengembangkan usaha UMKM.

Optimalisasi UMKM dipandang penting harus dikembangkan adalah dengan keterjangkauan teknologi dan informasi yang ada pada seluruh jaringan UMKM sebagai pelaku utama di masyarakat. Sehingga dengan begitu para pelaku UMKM dapat meminimalkan biaya pemasaran, biaya produksi, sehingga dengan seperti itu dapat mewujudkan UMKM yang praktis dan efisien sehingga menimbulkan UMKM yang optimal dalam menjaga serta membangkitkan Kembali gairah ekonomi sehingga UMKM bisa naik kelas.

Dengan metode analisis sederhana seperti PEST yaitu Politik, Ekonomi, Sosial dan Teknologi, diharapkan untuk mengoptimalkan faktor eksternal UMKM, yakni sebagai berikut:

1. Kebijakan politik

LKPP sudah memfasilitasi kemudahan UMKM untuk menjadi salah satu penyedia dalam E-Katalog dan ada kebijakan yang di kawal

BPKP untuk penggunaan P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri)

2. Kebijakan Ekonomi

Stimulus terus diberikan seperti perubahan aturan pada pinjaman, bantuan permodalan, tagihan listrik yang meringankan, serta pembiayaan lainnya. Pencanagnan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan wujud nyata pemerintah mendukung dalam segi aturan ekonomi.

3. Kebijakan Sosial

UMKM masih banyak pada posisi informal, oleh sebab itu dibutuhkan daya dukung agar mengalami perubahan ke posisi formal. Kerumitan perizinan di Indonesia menjadi sebuah masalah dengan banyaknya regulasi pusat dan daerah atau hiper-regulasi yang mengatur perizinan yang dapat menimbulkan disharmoni, tumpang tindih, tidak operasional, dan sektoral. Harga lebih kompetitif karena sumber bahan baku yang lebih mudah di dapat di dalam negeri.

4. Kebijakan Teknologi

Melalui upaya UMKM go-digital, go-legal yang diatasi Pemerintah dengan menghilangkan berbagai hambatan regulasi dalam ekosistem melalui UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya PP No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

b) Saran

Merujuk pada hasil penjabaran dan kesimpulan yang dikemukakan, maka penulis memberikan Saran yaitu :

1. Baiknya penerapan tata Kelola atau *good corporate governance*, diharapkan dapat memberikan kepastian kualitas serta terus eksisnya organisasi UMKM, antara lain dilakukan dengan: *Pertama*, pemasaran hasil produksi dengan pemanfaatan *platform online*. *Kedua*, UMKM harus merubah budaya tradisional kepada modern, dengan mengacu pada aturan yang berlaku, sehingga tata Kelola dapat berjalan dengan baik dan UMKM bisa naik kelas. *Ketiga*,

sebagai pelaku UMKM harus melek digital agar dapat memajukan hasil produksi secara digital.

2. Mendorong Pemerintah melakukan Relaksasi Ekonomi terhadap UMKM, dengan cara melakukan yakni *Pertama*, dalam masa sulit ini perlu adanya upaya cepat dalam merestrukturisasi relaksasi kredit pada UMKM. *Kedua*, ketersediaan metode pembiayaan yang baru dan mudah di akses oleh para pelaku UMKM. Terbebas dari syarat syarat yang menyulitkan para UMKM untuk mendapatkan bantuan modal usaha dari perbankan. *Ketiga*, bantuan sosial yang menyentuh para pelaku UMKM untuk mendukung usaha mereka, Dan hal *keempat*, pemberian peluang bagi pengusaha UMKM untuk berproduksi diseluruh *sector* agar UMKM bisa naik kelas.
3. Guna meningkatkan pemulihan ekonomi maka Peran dan kinerja Pemerintah sangat diharapkan dan UMKM perlu dioptimalkan dengan cara membangun UMKM melalui: *Pertama*, memperkuat akses pasar UMKM dengan menjadikan Smesco Indonesia sebagai trading house. *Kedua*, menyusun e-catalog untuk memudahkan pembeli dalam dan luar negeri, dan go digital hingga memperluas KUR agar sesuai dengan kebutuhan pembiayaan UMKM yang mudah di akses serta terbebas darinsyarat syarat yang memberatkan para pelaku UMKM. *Ketiga*, tersedia pembiayaan bagi UMKM yang lebih ramah; koperasi simpan pinjam juga bisa menjadi mitra pemerintah untuk usaha mikro dari sisi penyediaan pembiayaan bagi UMKM agar tetap dapat berkembang usaha UMKM. *Keempat*, inovasi bagi kegiatan produksi UMKM baik dari sisi produksi, distribusi, pembiayaan, hingga pemasaran terjangkau dan UMKM dapat naik kelas sesuai yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakti Hotniar Siringoringo, 2005. Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Budiarto, Miriam. 2009. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Inu Kencana Syafie, Etika Pemerintahan, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- J. Salusu, 2015. Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit, Jakarta: PT Grasindo.
- Machfud Sidik. 2001. Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah.
- Moleong, Lexy, 2004. Metode Penelitian Kualitatif: PT Remaja Rodakarya Badung, 2004.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta : Rineka Cipta.
- Ryaas Rasyid, 2000, Makna Pemerintahan, PT. Mutiara Sumber Daya Widya, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Subagyo. 2020. Pemerintah Dorong UMKM Jadi Penggerak Ekonomi Rakyat.
Diakses pada tanggal 29 Januari 2022 melalui [www.kompas.com](#)
- Syafaruddin Anzizhan, 2014. Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan, Jakarta: PT Grasindo.
- Taringan, Robinson. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Winardi, 1996. Pengantar Manajemen Penjualan, Bandung: PT. Citra Aditya
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hal. 800
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

<https://www.antaranews.com/berita/1660458/pemerintah-dorong-umkm-jadipenggerak-ekonomi-rakyat-dalam-pen.>

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-prioritaskan-umkm-dalam-alokasi-pen-2022/>

<https://kemlu.go.id/portal/id/read/2930/berita/wujud-solidaritas-penanganan-covid-19-malaysia-serahkan-donasi-ke-indonesia>

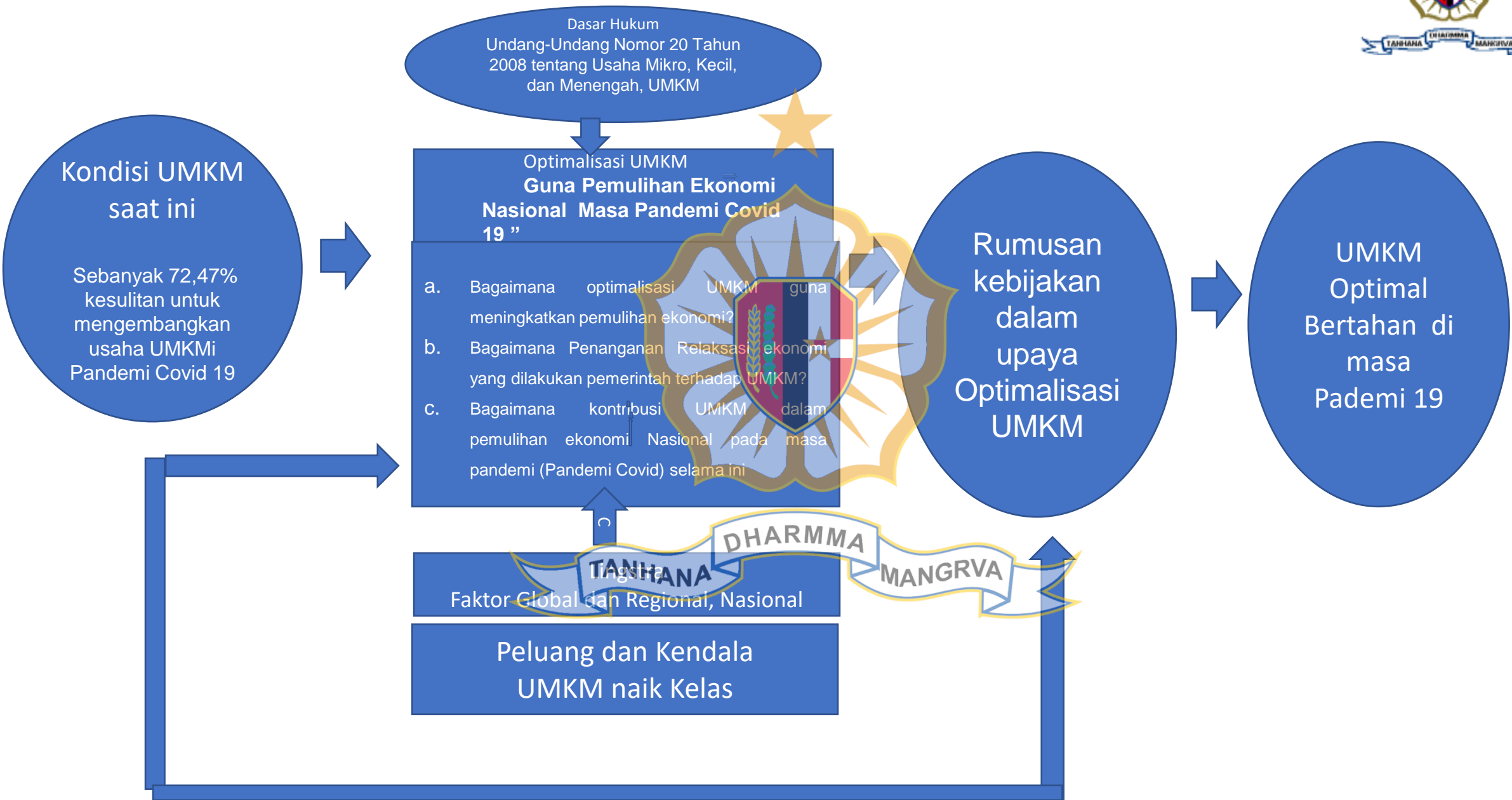
<https://kemlu.go.id/singapore/id/news/6271/informasi-terbaru-berkaitan-dengan-covid-19-di-singapura>

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201218100847-106-583738/cara-thailand-dan-kamboja-tekan-kasus-corona-tetap-rendah>





Alur Pikir



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. DATA PRIBADI

- a. Nama (Lengkap dengan Gelar) : Dr. Sri Sundari, SH., MM
- b. N I P : 196705281989022001
- c. Tempat, Tanggal Lahir : Bengkulu, 28-05-1967
- d. Jenis Kelamin : Wanita
- e. Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda IV/c
- f. T M T CPNS : 24 April 1989
- g. Jabatan terakhir : Inspektur DPD RI
- h. A g a m a : Islam
- i. Status Perkawinan : Kawin
- Jumlah Anak : 3 (tiga)
- j. Alamat Rumah : Jalan Penggalang Raya Maret. I RT 7, RW 3
Kel. Palmariam, Kec. Matraman, Maret Timur,
DKI Maret.
- k. Nomor Telepon / HP : 082114969618
- l. Alamat Email : s.sundari@dpd.go.id
- m. KTP : 3175016005670001
- n. NPWP : 47.206.961.6-001.000

II. RIWAYAT PANGKAT

Pangkat (Gol)		TMT Pangkat	Nomor SK	Tanggal SK
CPNS	II/b	1 Februari 1989	2200396090	9 Jan 1989
Penatur Muda	II/b	16 April 1990	0774/1990	16 April 1990
Pengatur	II/c	15 Okt 1992	14-09/1992	15 Oktober 1992
Penata Muda	III/a	1 Maret 2000	SH-14-09/1996	1 Maret 2000
Penata Muda Tk I	III/b	28 Maret 2005	04.01.01.4.1.27/28	28 Maret 2005
Penata	III/c	1 Oktober 2007	167/2007	1 Oktober 2007
Penata Tk I	III/d	1 Oktober 2011	591/2011	10 Oktober 2011
Pembina	IV/a	1 April 2015	224/2015	1 April 2015
Pembina Tk I	IV/b	1 April 2019	A1-140050000011	1 April 2019
Pembina Muda Utama	IV/C	1 April 2021	607 TAHUN 2019	31 OKTOBER 2019



III. RIWAYAT JABATAN

No.	Jabatan	Uraian Singkat Tugas dan Kewenangan Jabatan	Nomor SK	Periode Menjabat	Nama Atasan Langsung	No. Kontak Atasan Langsung (telepon, HP)
1	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Biro Perencanaan Administrasi Sekjen DPD RI (IV/a)	Bertanggung jawab terhadap TU Sekretaris Jenderal DPD RI, Ibu Dr. Siti Nurbaya	97	24-08-2006 s/d 31-12-2008	Dra. Eulis Watidihati Msi	0821314333700
2	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekjen dan Biro Administrasi Sekjen DPD RI (IV/a)	Bertanggung jawab terhadap TU Sekretaris Jenderal DPD RI, Ibu Dr. Siti Nurbaya	233	31 – Des 2018 s/d 2 Jan 2014	Yunus Pasnaolif,SE	082188498970
3	Kepala Bagian Sekretariat Waka I Biro SetPim DPD RI (Eselon IIIa)	Menjadi Kabag dan Bertanggung jawab, dukungan keahlian dan administrasi pada - Wakil Pimpinan I DPD RI, Bpk Dr. Laode Ida; - Wakil Pimpinan I DPD RI, Bpk Irjen Pol Prof. Dr. H. Farouk Muhammad; - Wakil Pimpinan I DPD RI, Bpk. Letjen (Purn). Dr. Nono Sampono;	7.2014	2 Januari 2014 s/d 1-2-2018	Nana Sutisna S IP, .MSI	08121355626
4	Kepala Kantor Daerah DKI Jakarta DPD RI	Sebagai Kepala Kantor	440.2015	22 Januari 2015	Sekjen DPD RI, Dr. Siti Nurbaya	08211116061
5	Kepala Bagian Pengembangan SDM Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian (Eselon IIIa)	Bertanggungjawab untuk mengelola dan meningkatkan kemampuan SDM di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPDR I agar menjadi SDM unggul, DPD Maju	104-2018	1-2-2018 s/d 31-10-18	Lalu Niqman Zahir, S Sos, Msi	081291897711
6	Kepala Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi (Eselon IIIa)	Bertanggungjawab untuk mengelola Teknologi Informasi yang ada di DPD RI, agar dapat mengikuti perkembangan zaman.	690-2018	31-10-18 s/d sekarang	Adam Bachtiar, SH, MH	08129445399

7.	Kepala Biro Sistim Informasi dan dokumentasi	Bertanggungjawab untuk mengelola Teknologi Informasi yang ada di DPD RI, agar dapat mengikuti perkembangan zaman	607- 2019	31 Okt 2019 – 27 April 2020	Dr. Drs. Reydonnyzar Moenek, M. Devt.V	196011141984 031001
8	Inspektur	Pengawasan	439 Tahun 2021	27 April 2021	Dr. Rahman Hadi,M.Si	196909141990 031004

IV. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

No.	Pendidikan	Jurusan	Nama Sekolah / Universitas	Nomor Ijasah
1	Sekolah Dasar	-	Negeri Tabasating	No. 5365/1979
2	SLTP	-	Negeri Kepahiang	No. 220475577/1982
3	SLTA / SMU	IPA	PGRI 1 Curup	No. 220102227
6	Diploma III	Analisis Kesehatan	Akademi Analisis Kesehatan	000168/1988
8	Strata Satu	Hukum	Universitas Jakarta (UNJ)	1060/2002
9	Magister	Manajemen	STIE IRWIJA	AG 003358/2004
10	Doktor	Pemerintahan	UNPAD Bandung	UN6,002915/G30.000838/2013

V. RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No.	Nama Diklat/ Shortcourse/Workshop	Lembaga Penyelenggara	Nomor Sertifikat	Tahun
1	Training Tatap Muka Presentasi Memukau	Presentasi.net	-	2013
2	Bedah Buku	Program Pascasarjana STIAM Jakarta	-	2017
3	Training Tatap Muka Presentasi Memukau	Presentasi.net	-	2013
4	Diklat Public Speaking	PT. Parindo	-	2018
5	Diklat Jurnalistik	PT. Parindo	-	2018
6	Diklat Monitoring Reading	PT. Parindo	-	2018

7	Diklat Customer Service	PT. Parindo	-	2018
8	Diklat Character Building	PT. Parindo	-	2018
9	Diklat Pengembangan Kapasitas SDM	PT. Parindo	-	2018

VI. RIWAYAT PENUGASAN LAIN

Nama Tim / Kelompok Kerja	Instansi / Lembaga	Nomor Surat Penugasan	Tahun
TIM E-BOOK	Sekretariat Jenderal DPD RI	SK Nomor 61	2019
TIM KEAMANAN INFORMASI	Sekretariat Jenderal DPD RI	SK Nomor 63	2019
TIM LPSE	Sekretariat Jenderal DPD RI	SK Nomor 206	2019

VII. PRESTASI

No.	Prestasi yang pernah dicapai*	Tingkat**	Pemberi Penghargaan	Tahun Perolehan
1	Piagam Tanda Kehormatan Presiden RI Setya Lencana Karya Satya 20 th	Organisasi Kerja	Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono	2009
2.	Piagam Tanda Kehormatan Presiden RI Setya Lencana Karya Satya 30 th		Presiden RI Joko Widodo	2019

VIII. KARYA TULIS

Buku, Makalah, Penelitian, Bahan Seminar yang pernah dipublikasikan

No.	Judul	Tahun	Keterangan
1	Kepemimpinan	30 Januari 2018	Buku
2	Buku Mau kemana Anda Setelah SMA	3 Maret 2018	Buku
3	Buku Pilkada Penuh Eforia, miskin makna	1 Sept 2015	Buku
4.	Buku Kamus Rejang -Indonesia	2006	Buku
5.	Disertasi Judul Koordinasi DPR dan DPD dalam penyerapan aspirasi rakyat	2013	Disertasi
6.	Pelaksanaan UUD NRI 1945 & Urgensi Amandemen Kelima	2018	Buku

IX. KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

No.	Nama Organisasi / Kegiatan	Jabatan	Tahun
1	Dharma Wanita Setjen DPD RI	Wakil Ketua	2018 - 2019
2	Wanita Islam DKI	Ketua umum	2013-2018
3	IQRA DKI	Ketua umum	2017-sekarang
4	P3DI	Ketua umum	2017-sekarang
5	IKPK	Ketua umum	2016-sekarang
6	LKPI	Presiden	2014-sekarang
7	BMNBP	Ketua	2014-sekarang
8	ICMI	Dewan Pakar	2013
9	Alisa Khadijah DKI	Ketua Umum	1999-2005
	Patelki	Anggota	1999-2004

Dengan ini saya menyatakan bahwa Daftar Riwayat Hidup ini telah saya isi dengan benar dan lengkap.

Jakarta, 5 Agustus 2022

Yang membuat,



(Dr Sri Sundari, SH.,MM)